



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI GELAR PASUKAN INDONESIA DALAM
MENGHADAPI ANCAMAN-ANCAMAN ASIMETIRS
TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

HELMI AHDIAT RAHAWARIN

0806438540

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

JAKARTA

JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI GELAR PASUKAN INDONESIA DALAM
MENGHADAPI ANCAMAN-ANCAMAN ASIMETIRS
TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master (M.Si)

HELMI AHDIAT RAHAWARIN

0806438540

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

KEKHUSUSAN STUDI PENGKAJIAN STRATEGIK DAN KEAMANAN

JAKARTA

JUNI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **HELMI AHDIAT RAHAWARIN**

NPM : **0806438540**

Tanda Tangan :

Tanggal :







HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **HELMI AHDIAT RAHAWARIN**
NPM : **0806438540**
Program Studi : **ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**
Judul Tesis : **STRATEGI GELAR PASUKAN INDONESIA
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN-ANCAMAN
ASIMETIRS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar master ilmu hubungan internasional pada program studi ilmuhubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tirta N. Mursitama.  (.....)
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA.  (.....)
Pembimbing : Andi Widjajanto, MS, MSc.  (.....)
Penguji Ahli : Broto Wardoyo, S.Sos, MA.  (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HELMI AHDIAT RAHAWARIN**
NPM : **0806438540**
Program Studi : **ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**
Departemen : **ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**
Fakultas : **ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jenis Karya : **TESIS**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**STRATEGI GELAR PASUKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN-ANCAMAN ASIMETRIS TERHADAP KEDAULATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan :

(HELMI AHDIAT RAHAWARIN)

ABSTRAK

Nama : **HELMI AHDIAT RAHAWARIN**
Program Studi : **ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**
Judul : **STRATEGI GELAR PASUKAN INDONESIA
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN-ANCAMAN
ASIMETIRS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasca tragedi pengeboman World Trade Centre (WTC) ancaman transnasional khususnya terorisme semakin marak terjadi sehingga tindakan perlunya penanganan dan pemberantasannya. Perubahan ini seharusnya mempengaruhi persepsi gelar pasukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman terorisme transnasional atau ancaman asimetris, seharusnya gelar pasukan Indonesia tidak hanya melihat ancaman internal sebagai ancaman utama akan tetapi perlunya juga melihat perubahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagai lingkungan bermain Indonesia, dalam hal ini ancaman yang bersumber dari luar atau eksternal.

Pada kenyataannya persepsi ancaman gelar pasukan Indonesia masih melihat internal sebagai ancaman utama dengan strategi gelar pasukan yang lebih ditujukan kepada stabilitas keamanan dalam negeri.

Key words :

Gelar pasukan, ancaman asimetris, terorisme

ABSTRACT

Name : HELMI AHDIAT RAHAWARIN
Study Program : INTERNATIONAL RELATIONS
**Title : INDONESIA FORCE EMPLOYMENT STRATEGY
ON FACING ASYMMETRIC THREATS TO
INDONESIA SEVEREIGNTY**

After World Trade Centre (WTC) Tragedy, transnational threats especially terrorism is often happen so it needs to be handled and to be combat. This change should influence the perception of Indonesia force employment in guarding Indonesia sovereignty from transnational terrorism threat or asymmetric threats, Indonesia force employment should not only looking internal threats as main threats but also need to see the change happen in Southeast Asia region as a play ground for Indonesia, in this case external threats.

In fact, Indonesia force employment perception still looking for internal threats as main threats with force employment assembling strategy which more function to maintain internal stability.

Key words :

Force employment, asymmetric threat, terrorism

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Signifikansi Penelitian	10
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Asumsi	16
1.7. Hipotesis	16
1.8. Model Analisa	17
1.9. Operasionalisasi Konsep	17
1.10. Hubungan Antar Konsep	19
1.11. Metodologi Penelitian	20
1.12. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II Ancaman Asimetris Terhadap Kedaulatan Republik Indonesia	22
2.1. Ancaman Asimetris yang Dihadapi Indonesia	23
2.2. Terorisme Sebagai Ancaman Asimetris Paling Nyata	25
2.3. Kebijakan Penanganan Terorisme di Asia Tenggara	43
2.4. Kesimpulan	47
BAB III Strategi Gelar Pasukan TNI	51
3.1. Gelar Pasukan TNI	55
3.2. Gelar Pasukan TNI Angkatan Laut	70
3.3. Gelar Pasukan TNI Angkatan Darat	73
3.4. Gelar Pasukan TNI Angkatan Udara	76
3.5. Kesimpulan	79
BAB IV Gelar Pasukan TNI dalam Menghadapi Ancaman Asimetris	81
4.1. Ancaman Asimetris di Asia Tenggara dan Gelar Pasukan TNI	81
4.1.1. Ketidakpekaan Penempatan Gelar Pasukan Terhadap Eksistensi Terorisme	83
4.1.2. Kebijakan Penanganan Terorisme yang Tidak Sejalan dengan Kebijakan TNI dalam Menempatkan Pasukan	88
4.2. Kesimpulan	92

BAB V Kesimpulan dan Saran.....	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Implikasi Teoritis	98
5.3. Implikasi Kebijakan	99

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan-Tujuan Politik Aksi Terorisme	29
Tabel 2.3. Jumlah kejadian terorisme internasional 1984 – 1996	35
Tabel 2.4. Organisasi-Organisasi Pelaku Terorisme di Asia Tenggara	36
Tabel 2.5. Serangkaian Kejadian Terorisme di Indonesia	37
Tabel 2.6. Kebijakan Pemberantasan Aksi Terorisme Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putrid an Susilo Bambang Yudhoyono	45
Tabel 3.1. Operasi Militer TNI	57
Tabel 3.2. Kekuatan Personil TNI Tahun 2007	60
Tabel 3.3. Gelar Pasukan Militer Indonesia Tahun 2007	62
Tabel 3.4. Kondisi Kritis Alutsista Pada Tahun 2007	67
Tabel 3.5. Alutsista Matra Laut dan Tingkat Kesiapannya	72
Tabel 3.6. Alutsista Matra Darat dan Tingkat Kesiapannya	75
Tabel 3.7. Alutsista Matra Udara dan Tingkat Kesiapannya	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Elemen-Elemen yang Menjadi Pintu Masuk Teroris Internasional ke Dalam Negara	27
Grafik 2.2. Teror dan Fungsi Lain dari Aktor Non-Negara	31
Grafik 2.3. Elemen-Elemen Tindakan Teroris	32
Grafik 2.4. Jumlah Insiden Terorisme di Thailand Selatan Januari 2004 – April 2008	34
Grafik 2.5. Jumlah Kematian dan Luka-Luka Akibat Aksi Terorisme di Asia Tenggara dan Oseania Kebijakan	40
Grafik 2.6. Jumlah Kejadian, Kematian dan Kerugian Akibat Terorisme	41
Grafik 3.1. Jumlah Personil TNI Tahun 2007	61
Grafik 3.2. Gelar Pasukan TNI	66
Grafik 3.3. Gelar Pasukan Matra Laut	70
Grafik 3.4. Jumlah Alutsista Matra Laut dan Tingkat Kesiapannya	73
Grafik 3.5. Gelar Pasukan Matra Darat	74
Grafik 3.6. Jumlah Alutsista Matra Darat dan Tingkat Kesiapannya	75
Grafik 3.7. Gelar Pasukan Matra Udara	76
Grafik 3.8. Jumlah Alutsista Matra Udara dan Tingkat Kesiapannya	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perubahan dunia internasional selalu terjadi dan akan mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, kebijakan yang dimaksud tidak hanya pada lingkup perpolitikan, tetapi juga pertahanan dan keamanan negaranya dalam berinteraksi dengan dunia luar. Dalam hal ini, kekuatan militer memainkan peranan penting sebagai instrumen politik kepentingan nasional.¹ Kekuatan militer tidak hanya berbicara mengenai postur militer saja, namun faktor gelar pasukan, persiapan dan operasionalisasi yang dipengaruhi oleh kondisi strategis.² Dengan kata lain, kekuatan militer suatu negara menjadi salah satu faktor penentu pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian kepentingan nasional diperlukan pengembangan kekuatan pertahanan yang dapat memberikan nilai tawar yang lebih baik bagi suatu negara.

Kekuatan militer sebagai bagian dari postur pertahanan adalah kapasitas sebuah negara untuk, secara politik mempengaruhi negara lain atau sistem dalam hubungan internasional.³ Dalam konteks ini, kekuatan militer berfungsi sebagai alat pemaksa kepada negara lain untuk dapat memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara haruslah mampu untuk melakukan pengembangan terhadap kekuatan militernya sebagai upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya dan juga sebagai alat pemelihara keamanan negaranya. Alat pemelihara keamanan yang dimaksudkan disini adalah militer merupakan elemen terdepan suatu negara dalam menghadapi ancaman dari negara lain.

¹ Vladimir Plotnikov, Headquarter of Russian Airborne Troops dalam *Use of Force in Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency*, h. 115.

² Paul K. Davis, Et al, *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a New Framework*, Issue Paper, Rand: National Defense Research Institute (August 1996), h. 1.

³ Vladimir Plotnikov, op. cit. h. 116.

Tentunya dengan suatu strategi pertahanan yang dapat mencakup ke seluruh wilayah kedaulatan negaranya.

Strategi pertahanan yang tepat harus mampu menjawab tiga pertanyaan penuntun yang mendasar, yaitu apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya.⁴ Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.⁵ Pertahanan negara dalam upaya pembangunannya haruslah disesuaikan dengan wilayah geografis negara tersebut. Sehingga dapat secara efektif melakukan penangkalan terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi yang timbul sebagai dampak terjadinya perubahan dunia internasional. Dalam suasana tidak perang, kekuatan pertahanan, dapat menjadi simbol kedaulatan, kebanggaan, harga diri serta menjadi sarana penggertak atau penggentar (*deterrent*) di pentas regional dan global.⁶ Dengan kata lain, kekuatan pertahanan haruslah senantiasa di kembangkan dan di perkuat dalam rangka menjaga kedaulatan negara agar tetap memiliki kekuatan penangkal yang efektif dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negaranya.

Dalam buku putih pertahanan Indonesia 2008 dijelaskan bahwa: esensi penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam wadah NKRI. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kemampuan daya tangkal suatu bangsa dan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alutsista, anggaran pertahanan yang besar dan jumlah personil yang dimiliki tetapi juga ditentukan oleh strategi pertahanan yang

⁴ Juwono Sudarsono, Kata Pengantar : Strategi Pertahanan Indonesia 2008.

⁵ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 45.

⁶ Yusron Ihza, *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, Latofi Enterprise, 2009, h. 71.

komprehensif yang dapat menciptakan rasa aman sebagai upaya penyelenggaraan stabilitas keamanan.⁷

Perubahan dunia internasional saat ini dihadapkan pada semakin maraknya ancaman-ancaman yang bersifat non-konvensional, isu-isu seperti terorisme, pencucian uang, pembajakan di laut, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, dan perdagangan senjata ilegal. Fakta ini menuntut kesiapan dari seluruh negara dalam upaya untuk menciptakan stabilitas baik secara internal negara maupun secara regional. Secara internal dengan melakukan pengembangan kemampuan penangkalan militernya, secara regional dengan cara bekerja sama dengan negara lain untuk dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasannya.

Indonesia sebagai entitas yang memiliki peran dalam dunia internasional, tidak akan terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia internasional. Perubahan yang terjadi akan berdampak pada persepsi Indonesia terhadap perubahan yang terjadi. Terkait dengan maraknya ancaman-ancaman non-konvensional maka Indonesia dituntut untuk dapat membangun kekuatan pertahanan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara menjadi salah satu tantangan untuk ditanggulangi secara serius dengan menggunakan pendekatan lintas lembaga, baik secara nirmiliter maupun militer.⁸ Menurut Rizal Sukma, dalam hal ini, ancaman dapat dipahami dalam tiga aspek, yakni (a) sebagai pernyataan mengenai maksud untuk menimbulkan kerusakan, penderitaan, ataupun kesengsaraan; (b) indikasi akan terjadinya kerusakan, bahaya, atau penderitaan; dan (c) seseorang atau sesuatu yang dianggap bahaya atau sangat berkemungkinan menimbulkan kerusakan, penderitaan, dan kesulitan.⁹ Ancaman-ancaman itu kemudian diidentifikasi kedalam bentuk konkrit berupa: (1) terorisme, (2) separatisme, (3) radikalisme, (4) konflik komunal, (5) kerusuhan sosial, (6) perompakan dan pembajakan di laut, (7) imigrasi ilegal, (8) penangkapan ikan ilegal dan

⁷ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 5.

⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 7.

⁹ Rizal Sukma, *Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi*, CSIS, Jakarta FGD Pro-Patria, 23 September 2003, h. 2.

pencemaran laut, dan (9) penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.¹⁰ Dalam perkembangan kekinian di samping persoalan-persoalan keamanan tradisional yang dapat mengancam langsung maupun tidak langsung, muncul pula masalah-masalah keamanan baru yang lebih langsung mempengaruhi keamanan nasional, yakni isu ancaman keamanan baru non tradisional (*non traditional security issues*) yang meliputi isu-isu terorisme (*terrorism*), lalu lintas obat terlarang (*drug trafficking*), perompakan dan pembajakan bersenjata di laut (*piracy and arms robbery at sea*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan dunia maya (*cyber crime*), penyelundupan senjata (*small weapons/ arms smuggling*), penyelundupan orang (*people smuggling*), perdagangan wanita dan anak-anak (*women and children trafficking*) yang hampir kesemuanya merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang notabene ikut melengkapi masalah-masalah keamanan domestik di masa kini dan mendatang.¹¹

Menurut Anak Agung Banyu Perwita, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahayangan, Bandung, mencoba mengklasifikasikan secara lebih spesifik ancaman yang akan dihadapi ke dalam enam kelompok ancaman;

1. Pertama, ancaman ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan, penyakit menular, keterbatasan akses pada pangan, dan degradasi lingkungan hidup. Hal ini, misalnya, tergambar jelas dengan maraknya penyakit flu burung dan pencegahan asap akibat kebakaran hutan di beberapa negara ASEAN.
2. Kedua, konflik antarnegara (*interstate conflict*). Kendati kecenderungan konflik ini di kawasan Asia Tenggara menurun secara signifikan, bukan berarti ancaman ini sama sekali hilang. Beberapa persoalan perbatasan antarnegara ASEAN yang belum terselesaikan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mayjen TNI Sudrajat, *Perubahan Wajah Ancaman Dan Keamanan Domestik Indonesia* Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Pembangunan Hukum Nasional VIII”, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003, h. 1.

tuntas, misalnya, dapat memicu ketegangan antarnegara, jika bukan konflik antarnegara, yang tinggi.

3. Ketiga, konflik internal (*intrastate conflict*) yang justru sejak berakhirnya perang dingin kecenderungannya kian meningkat. Ketegangan hubungan antara Malaysia dan Thailand, misalnya, merupakan akibat dari berbagai masalah domestik yang berasal dari isu ekonomi, politik dan sosial budaya. Kawasan Asia Tenggara masih menyimpan potensi besar bagi mengemukakan konflik internal. Masalah ini akan menjadi akut jika isu separatisme terus merebak di kawasan ini.
4. Keempat, penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia, meski ancaman ini relatif kecil terjadi di Asia Tenggara, terlebih karena ASEAN merupakan kawasan bebas senjata nuklir (*SEANWZ*), bukan berarti kita dapat mengabaikan kemungkinan penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia.
5. Kelima, terorisme yang terus menunjukkan eskalasi aktivitasnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kawasan ini bahkan dipercaya menjadi salah satu tempat berkembang biaknya terorisme internasional.
6. Keenam, ancaman oleh organisasi kejahatan transnasional dalam bidang narkoba dan *illegal human trafficking* sebagaimana berkembang di beberapa negara ASEAN.¹²

Dilihat dari tipologi ancaman yang dikutip, maka dapat dilihat bahwa ancaman mengalami perubahan dimensi secara signifikan oleh karena itu dibutuhkan sistem pertahanan yang sifatnya fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan bentuk ancaman yang terjadi. Dapat dilihat bahwa ancaman-ancaman yang berkembang adalah yang bersifat nirmiliter, sehingga dalam upaya penangkalannya harus disesuaikan dengan tipologi ancamannya.

¹² Anak Agung Banyu Perwita, *Keamanan Non tradisional*, 2009. Melalui <http://Cetak.Kompas.Com/Read/2009/02/13/00233162/Keamanan.Nontradisional>, diakses pada tanggal 23 Maret 2011, pukul 13.45.

Dalam buku putih pertahanan Indonesia 2008 disebutkan beberapa ancaman yang masih akan dihadapi oleh Indonesia antara lain : konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non-tradisional, dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional dan global. Sedangkan ancaman tradisional seperti senjata pemusnah massal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten.¹³

Seiring dengan perubahan spektrum ancaman tersebut, tindakan ilegal dan kriminal lintas negara juga meningkat, dalam bentuk ancaman baru seperti terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba atau *drug trafficking* yang dilakukan secara terorganisir. Jadi, seiring dengan meningkatnya bentuk ancaman asimetris serta motif yang dilakukan serta munculnya kriminal lintas negara (*transnasional crime*) maka dibutuhkan pertahanan negara yang tidak hanya mampu untuk menangkal masuknya ancaman-ancaman tersebut ke wilayah darat NKRI tetapi perlunya penangkalan sebelum muncul dan berkembang menjadi ancaman yang merusak tatanan hidup bernegara.

*Since the end of the Second World War, wars between state and substate actors have more and more often fallen into the category of "asymmetric" war : war between two actors or groups of actors characterized by a large gap in material power relative to each other.*¹⁴ Perang asimetris sering diartikan sebagai bentuk perang yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas, bersifat multidimensi, meliputi bidang-bidang nirmiliter yang bertujuan untuk senantiasa akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga suatu negara akan mengalami kehancuran dari dalam. Perang dengan tingkat kekuatan kedua belah pihak yang tidak seimbang, pada umumnya aktor yang berperan bisa negara dan non-negara. Dalam upaya mencapai kemenangan, kedua belah pihak mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki

¹³ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 8.

¹⁴ Ivan Arreguin-Toft, "How The Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict, International Security, Vol.26 No.1 (summer 2001), h. 15.

untuk menghancurkan lawannya. Dewasa ini perang asimetris yang terjadi biasanya merupakan upaya negara dalam mengamankan wilayahnya dari serangan terorisme, terorisme merupakan ancaman yang bisa bersifat domestik maupun internasional (intermestik). Oleh karena itu dibutuhkan strategi pertahanan baik kekuatan persenjataan, gelar pasukan maupun taktik dan strategi yang secara komprehensif dapat mencakup ke seluruh wilayah.

Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan. Fungsi penangkalan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia. Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu pada instrumen penangkalan berupa instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer. Instrumen politik menempatkan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara, bersinergi dengan faktor-faktor politik lainnya yang saling memperkuat. Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman. Fungsi penindakan dilaksanakan melalui tindakan preemptif, perlawanan, sampai dengan mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia. Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan baik secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, atau se-rangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam. TNI bersama dengan instansi pemerintahan lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh.¹⁵ Fungsi sistem pertahanan negara tidak akan dapat berjalan dengan efektif jika tidak didukung dengan kemampuan persenjataan yang lebih baik dan strategi gelar pasukan yang dapat mencakup ke seluruh wilayah Indonesia.

¹⁵ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 46-48.

Terdapat berbagai bentuk gelar pasukan yang bersifat dan masih berorientasi ke dalam untuk memperhatikan persoalan dalam negeri atau ancaman yang bersifat domestik. Dalam hal ini, peranan dan proyeksi militer Indonesia terutama permasalahan gelar pasukan masih ditujukan untuk pengamanan dalam negeri saja di tengah maraknya ancaman asimetris dan isu perbatasan yang justru bermain di ranah terluar perbatasan darat dan laut Indonesia.

Indonesia sendiri sebenarnya memiliki daftar panjang dijadikan sasaran perang asimetri. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus melakukan perang asimetri terhadap pendudukan Belanda hingga 1950, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), krisis Timor-Timur, Gerakan Pengacau Keamanan di Papua, dan lainnya. Kejadian-kejadian diatas merupakan contoh kasus perang asimetris, dimana GAM dan Gerakan Pengacau Keamanan di papua menggunakan strategi gerilya sebagai strategi perangnya. Hal ini menyebabkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kesulitan untuk mengidentifikasi para anggota separatis tersebut karena mereka berbaur dengan masyarakat sipil.

Dalam penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang no. 34 Tahun 2004 : yang dimaksud dengan postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut harus memperhatikan dan menguatamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.¹⁶

Salah satu ancaman non-konvensional yang marak terjadi belakangan ini adalah ancaman terorisme, terorisme semakin menjadi isu yang mendapatkan perhatian utama dunia internasional pasca terjadinya tragedi 11 September 2001,

¹⁶Penjelasan Undang Undang No.34 tahun 2004, pasal 11 (2).

dimana terjadi pengeboman terhadap menara kembar *World Trade Centre* (WTC) di Amerika Serikat, Terorisme sendiri didefinisikan sebagai :

Istilah terorisme dan teroris memiliki persamaan makna dan motif yang terkait. Defenisi dari teroris adalah seorang individu atau sebuah kelompok yang mana terlibat dalam aktivitas teroris baik secara langsung maupun tidak langsung (mendalangi). Di sisi lain, terorisme didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh person atau sebuah kelompok dengan kekuatan tanpa persetujuan dari musuh dan menggunakan senjata apa dan lainnya.¹⁷

“Domestic terrorism refers to activities that involve acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any state; appear to be intended to intimidate or coerce a civilian population; to influence the policy of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and, occur primarily within the territorial jurisdiction of the United States”.¹⁸

Terorisme didefinisikan Steven & Gunaratna sebagai : ancaman atau tindakan secara politik yang termotivasi pada kekerasan secara langsung terutama kepada masyarakat sipil.¹⁹ Dari beberapa defenisi yang disebutkan diatas, terdapat beberapa kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme, yakni : pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis (kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan / kekejaman / penganiayaan fisik); penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik; adanya unsur pendadakan/kejutan; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari

¹⁷ Balakrishnan, K.S (2002). *Keganasan antarabangsa dan kerjasama ASEAN (The international terrorism and ASEAN cooperation)*. Jurnal Pemikir (29). July–September. h, 12.

¹⁸ *Counterterrorism Division Federal Bureau of Investigation (FBI)*. h. 25.

¹⁹ Steven Graeme C.S. & Rohan Gunaratna, *Counterterrorism: A Reference Handbook* (St. Barbara, California: Contemporary World Issues, 2004, h. 30.

sasaran/korban langsungnya ; sasaran pada umumnya nonkombatan; direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.²⁰

Normatifnya, strategi gelar pasukan merupakan salah satu faktor penentu kekuatan daya tangkal suatu negara, negara yang gelar pasukannya lebih memperhatikan kondisi internalnya sebagai potensi ancaman yang besar dan kurang memperhatikan kondisi perubahan yang terjadi di wilayah eksternal, akan menyebabkan lemahnya kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Seharusnya strategi gelar pasukan ditujukan sebagai langkah strategis untuk melihat ancaman baik secara internal maupun eksternal, sehingga mampu untuk memiliki kekuatan penangkal yang tidak hanya efektif terhadap ancaman yang datang dari dalam saja tetapi juga yang datang dari luar wilayah negaranya, mengingat juga sifat-sifat ancaman non-konvensional yang lintas negara, salah satunya terorisme yang sifatnya intermestik. Namun pada kenyataannya gelar pasukan Indonesia lebih ditujukan untuk melihat ancaman yang sifatnya internal. Tentunya terjadi kesenjangan diantara sumber munculnya ancaman-ancaman dan orientasi gelar pasukan Indonesia dalam melihat ancaman. Dengan kata lain, terorisme menjadi ancaman keamanan dan stabilitas regional yang jauh lebih sulit ditebak, karena sifatnya yang *amorphous*, tidak berbentuk, serta tidak mengakui batas-batas negara dan kedaulatan dalam operasinya.²¹ Dalam lingkup luas, perubahan itu terlihat pada agenda keamanan global yang mengarahkan perhatian dunia pada ancaman terorisme bentuk baru (*new terrorism*).²²

²⁰ Alex Schmid, *Political Terrorism; A Research Guide*. New Brunswick, N.J.: Trans Action Books, 1984, seperti dikutip dalam Walter Lacqueur, "reflection on Terrorism," *Foreign Affairs*, Fall 1980, h. 88

²¹ C.P.F. Luhulima, Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara, dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003 No. 1, Jakarta: CSIS, 2003. h. 32.

²² Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 64.

1.2. Rumusan Masalah

Strategi gelar pasukan Indonesia seharusnya lebih ditujukan untuk dapat mengatasi berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dikarenakan pasukan pertahanan berfungsi sebagai pengaman negara dan penjaga kedaulatan wilayah Indonesia, akan tetapi untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia tidak hanya ditentukan oleh postur pertahanan, anggaran pertahanan dan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), akan tetapi perlunya juga strategi pertahanan yang komprehensif, strategi gelar pasukan Indonesia saat ini lebih banyak ditujukan untuk melakukan pengamanan serta menjaga stabilitas dalam negeri. Dengan kata lain, adanya kejanggalan dari strategi gelar pasukan Indonesia dimana strategi gelar pasukan masih ditujukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang berasal dari dalam negeri saja. Sedangkan ancaman-ancaman asimetris atau transnasional dari luar semakin marak terjadi. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kejanggalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kekuatan pertahanan Indonesia. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pertanyaan penelitian berupa : **“mengapa strategi gelar pasukan Indonesia masih ditujukan untuk pengamanan persoalan dalam negeri saja di tengah maraknya ancaman asimetris dan kedaulatan yang dihadapi Indonesia?”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang menjadi pertanyaan penelitian mengapa strategi gelar pasukan Indonesia masih ditujukan untuk melakukan pengamanan persoalan dalam negeri saja di tengah maraknya ancaman asimetris dan kedaulatan yang dihadapi Indonesia?.

1.3.2. Diharapkan juga melalui penelitian ini maka dapat memberikan gambaran tentang gelar pasukan Indonesia yang masih melihat wilayah internal masih menjadi potensi konflik terbesar yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia serta memberikan gambaran akan ancaman-ancaman asimetris yang berasal dari luar wilayah kedaulatan Indonesia.

1.3.3. Mencoba memberikan rumusan strategi gelar pasukan yang tidak hanya berorientasi ke dalam saja dalam melihat potensi-potensi ancaman yang berkembang tetapi juga memperhatikan spektrum ancaman yang berasal dari luar.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Meningkatkan wawasan tentang pola gelar pasukan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

1.4.2. Memperdalam wacana tentang gelar pasukan Indonesia dalam menghadapi maraknya ancaman dari luar.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang akan digunakan adalah kerangka konsep *Modern System Force Employment* milik Stephen Biddle dan kerangka operasionalisasinya menggunakan tulisan Ivan Arreguin-Toft, yang berjudul "*How the Weak Win Wars : A Theory of asymmetric conflict*", yang nantinya akan dioperasionalisasikan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pemikiran tentang konflik atau ancaman asimetris akan memberikan pemahaman bagaimana aktor dalam hubungan internasional dalam hal ini negara, dalam melihat bentuk ancaman yang sedang terjadi maupun yang berkemungkinan besar terjadi, pemikiran ini memberikan gambaran bagi setiap negara dalam menentukan strategi pertahanannya. Dijelaskan oleh Ivan Arreguin-

Toft (2001) bahwa: *strategy, as defined here, refers to an actor's plan for using armed force military or political objectives.*²³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa : *strategy should be distinguished from two closely related terms : grand strategy and tactics. Grand strategy refers to totality of an actor's resources directed toward military, political, economic, or other objectives. Tactics refers to the art of fighting battle and of using the various arms of the military.*²⁴

Strategi pertahanan Indonesia harus memenuhi 2 tuntutan. Pertama, ke dalam, bersifat komprehensif baik dilihat secara kewilayahan yang mencakup (meng-cover) seluruh wilayah Indonesia. Kedua, strategi pertahanan harus secara eksternal menciptakan daya tangkal terhadap kekuatan lain yang mengancam Indonesia.²⁵ secara kewilayahan, geografis Indonesia sangatlah luas dan terbuka, terbukti bahwa titik-titik yang sangat berpotensi menjadi *entry poin* termasuknya ancaman ada 4 yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Ombai Wetar. Akan tetapi keterbatasan kekuatan pertahanan yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu kendala yang membetasi pelaksanaan strategi pertahanan yang komprehensif, disamping itu juga anggaran pertahanan yang relatif kecil yang tidak sesuai dengan luas wilayah pertahanan yang dimiliki.

Kecenderungan lingkungan strategis Indonesia ke depan memberikan gambaran bahwa berbagai bentuk ancaman baik internal maupun eksternal kedaulatan Indonesia masih sangat besar, sehingga diperlukan pengembangan strategi pertahanan yang secara komprehensif dapat melindungi seluruh wilayah Indonesia. Strategi penangkalan yang cukup proporsional untuk dilaksanakan adalah strategi pertahanan berlapis. Strategi pertahanan berlapis memiliki 3 lapisan pertahanan, pertama, yang mencakup area pertahanan yang merupakan mandala peperangan secara berlapis dimana kekuatan militer merupakan kekuatan inti yang didukung oleh komponen cadangan dan pendukung. Kedua, pertahanan

²³ Ivan Arreguin-Toft, "How The Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict, International Security, Vol.26 No.1 (summer 2001), h. 99.

²⁴ *Ibid*, h. 100.

²⁵ ??????

berlapis juga harus diartikan sebagai sistem pertahanan yang mencakup aspek-aspek non-militer yaitu sistem politik termasuk diplomasi, ekonomi, dan sosial-budaya sebagai kekuatan tangkal pertahanan Indonesia.

Menurut Stephen Van Evera, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan terkait dengan kekuatan pertahanannya, yaitu faktor militer, faktor geografi, faktor sosial politik dan faktor diplomasi.²⁶ Keempat faktor tersebut adalah faktor-faktor yang secara langsung akan mempengaruhi kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh suatu negara, kekuatan pertahanan suatu negara akan senantiasa merefleksi keempat faktor diatas. Pada masa orde baru, kekuatan militer dan kebijakan yang dirumuskan tidaklah merefleksi perubahan lingkungan strategis Indonesia. Kebijakan yang dirumuskan lebih menekankan pada penguatan kekuatan pertahanan matra darat, dimana tidak sesuai dengan geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah yang sangat terbuka.

*Military power (or "capability") itself can mean different things in different contexts. Military forces, after all, do many things, ranging from defending national territory to invading other states, hunting down terrorist, coercing, concessions, showing the flag, or maintaining domestic order.*²⁷

*....., that force employment has played a more important role than either technology or preponderance for twentieth-century warfare. How force are used is critical; to explain historical outcomes shiefly in terms of material is to misinterpret the major military events of the century.*²⁸

Menurut Biddle, *force employment* lebih memegang peranan penting ketimbang teknologi maupun *preponderance* pada saat sekarang ini. Dilihat dari kutipan diatas yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana *force*

²⁶ Stephen Van Evera, *Offense, Defense, and the Causes of War*, International Security, Vol. 22, No. 4 (Spring, 1998), h.5.

²⁷ Stephen Biddle, *Military Power : Explaining Victory and Defeat in Modern Battle*, Princeton University Press, h. 5.

employment tersebut ditugaskan sesuai dengan strategi yang dijalankan. Tentunya hal ini bergantung kepada rumusan strategi pertahanan yang sesuai untuk menghadapi karakteristik yang berbeda dari setiap ancaman.

Pada umumnya, respon pertahanan suatu negara terhadap ancaman sedikit banyak bergantung kepada intensitas dari ancaman tersebut, semakin tinggi tingkat ancaman maka akan semakin besar pula perhatian pertahanan suatu negara dalam merespon ancaman tersebut. Negara yang kuat pertahanannya akan lebih mudah untuk melakukan penangkalan terhadap ancaman ketimbang negara yang lemah kekuatan pertahanannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan pertahanan untuk menciptakan daya tangkal yang efektif terhadap perbedaan karakteristik ancaman yang muncul dewasa ini. dinamika lingkungan, baik regional maupun internasional, terkait erat dengan persepsi inheren suatu negara (*main characteristic and inherent perception of typical features of security environment*), konteks geopolitik (*global nature of the environment where the nation exists and inherent perception of own position within it*), ancaman (sifat, bentuk, dan tingkat), dan sifat militer (kondisi angkatan bersenjata dan skema gelar kekuatan).²⁹

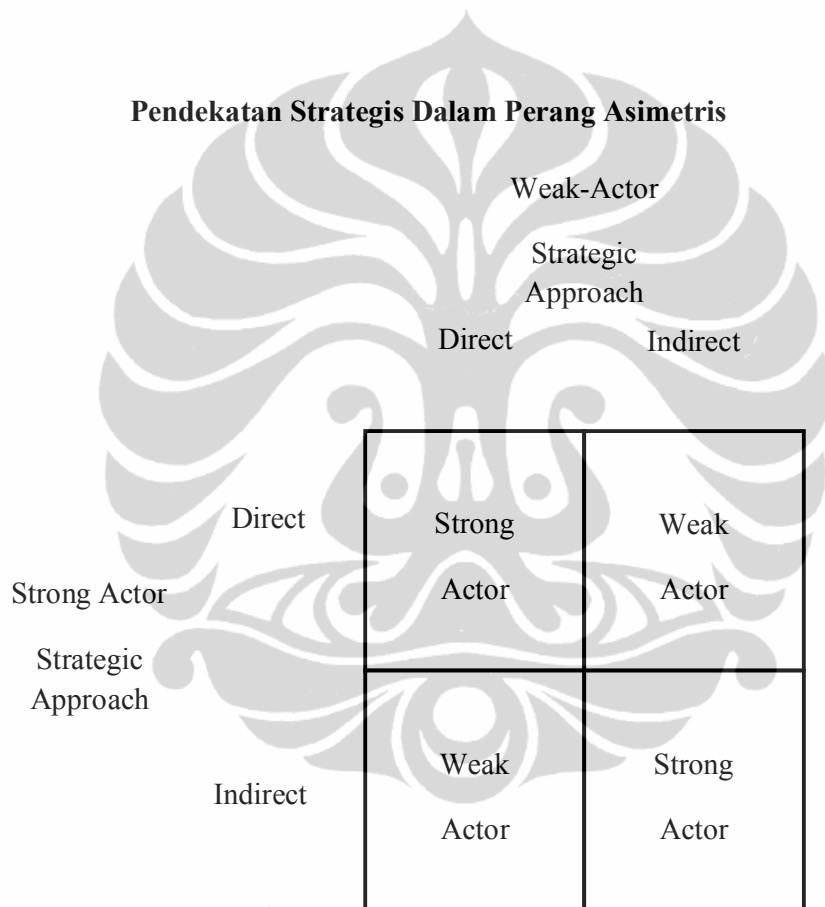
Ivan Arreguin-Toft menjelaskan bahwa dalam teorinya ada empat pilihan strategi yang bisa dijalankan dalam peperangan asimetris. Pihak yang lebih kuat dapat mengambil langkah *direct attack* atau *barbarism* dalam perang asimetris sebagai pilihan untuk memenangkan perang. Sementara pihak yang lemah akan cenderung untuk melakukan *direct defense* dan menggunakan strategi perang gerilya (*Geurilla Warfare Strategy*) sebagai strateginya.³⁰ Dalam perang asimetris, pihak lemah akan selalu melakukan perang gerilya sebagai langkah untuk melakukan perang karena dengan lemahnya kekuatan yang dimiliki, strategi perang gerilya menjadi pilihan paling rasional dalam perang asimetris. Yang lemah tidak akan menghadapi kekuatan yang lebih kuat dengan melakukan

²⁹ Oskar Krejci dalam Libor Frank, *The Czech Republic Security Environment*, diakses pada 20 April 2011 melalui http://www.army.cz/mo/om/obrana_a_strategic/1-2003eng/frank.pdf.

³⁰ Ivan Arreguin-Toft, "How The Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict, *International Security*, Vol.26 No.1 (summer 2001), h. 100.

serangan secara langsung dikarenakan kekuatannya yang lebih kecil dibandingkan dengan musuhnya.

Dalam perang asimetris Ivan Arreguin-Toft³¹, mencoba memberikan pendekatan strategis yang dapat menjadi pertimbangan aktor-aktor yang kuat dalam menghadapi musuhnya, pendekatan ini digambarkan dalam grafik berikut ini :



Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman asimetris, negara yang lebih superior haruslah menerapkan strategi *direct attack* ketika musuhnya memilih untuk menerapkan strategi *direct attack* pula. Begitupun sebaliknya, ketika musuh menerapkan strategi *indirect* maka negara pun harus

³¹ Ibid, h. 108.

menerapkan strategi yang sama untuk dapat memenangkan perang melawan musuh yang lebih inferior. Pada dasarnya pihak yang lemah dihadapkan pada dua pilihan yaitu strategi gerilya ataupun *direct defense*, sedangkan untuk pihak yang lebih kuat secara pertahanannya akan dihadapkan pada pilihan *direct attack* dan *barbarism*.

*Direct attack means the use of the military to capture or eliminate an adversary's armed forces, thereby gaining control of that opponent's values. The main goal is to win the war by destroying the adversary's capacity to resist with armed forces. Barbarism is the systematic violation of the laws of war in pursuit of a military or political objective. Unlike other strategies, barbarism has been used to destroy an adversary's will and capacity to fight.*³²

*Direct defense refers to the use of armed forces to thwart an adversary's attempt to capture or destroy values such as territory, population, and strategic resources. Like direct-attack strategies, these strategies target an opponent's military. The aim is to damage an adversary's capacity to attack by crippling its advancing or proximate armed forces. Guerrilla warfare strategy (GWS) is the organization of a portion of society for the purpose of imposing costs on an adversary using armed forces trained to avoid direct confrontation. These costs include the loss of soldiers, supplies, infrastructure, peace of mind, and most important, time.*³³

Lebih lanjut diungkapkan bahwa lebih rasional bagi pihak yang lemah untuk mengambil pendekatan *Geurilla Warfare Strategy* dalam menghadapi kekuatan yang lebih kuat ketimbang pendekatan *Direct Defense*. Dengan strategi perang gerilya dimana pihak yang lebih lemah akan menghindari terjadinya perang langsung atau *direct battle* dengan pihak yang lebih kuat. Sementara untuk pihak yang lebih kuat seharusnya menggunakan pendekatan *barbarism* ketimbang *Direct Attack* karena

³² Ivan Arreguin-Toft, "How The Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict, International Security, Vol.26 No.1 (summer 2001), h. 100–101.

³³ *Ibid*, h. 103.

asumsi yang digunakan adalah pihak yang lemah dengan menyerang langsung ke wilayah pihak yang lebih lemah.

Dalam teori *force employment* dijelaskan bahwa strategi gelar pasukan akan menentukan apakah gelar pasukan yang dilakukan bersifat ofensif atau defensif. Teori ini menjelaskan bahwa gelar pasukan akan dipengaruhi oleh operasi dan taktik yang dirumuskan dalam menghadapi karakteristik ancaman yang berbeda.

1.6. Asumsi

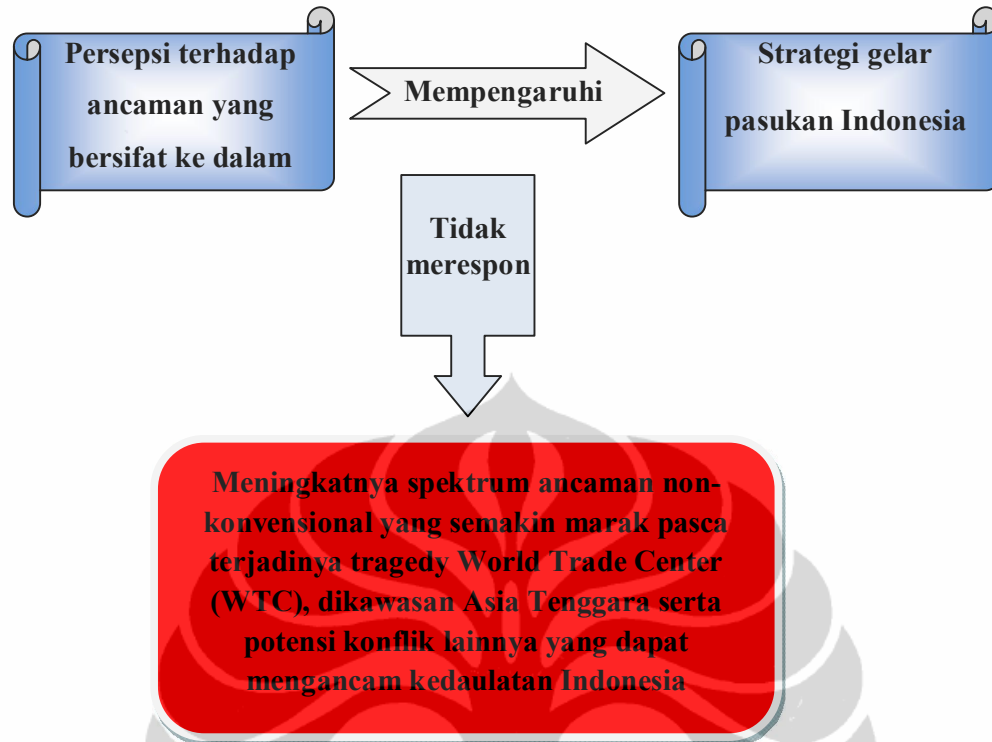
- 1.6.1. Strategi gelar pasukan yang dilaksanakan lebih bertujuan untuk memperhatikan ancaman-ancaman internal.
- 1.6.2. Orientasi ancaman masih bersifat internal sementara ancaman-ancaman eksternal semakin marak terjadi dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.

1.7. Hipotesis

Hipotesa sementara dari rancangan penelitian ini adalah strategi gelar pasukan Indonesia yang dilakukan saat ini masih diproyeksikan untuk memperkuat stabilitas politik dalam negeri sementara ancaman-ancaman asimetris makin marak terjadi dan mengancam kedaulatan wilayah Indonesia.

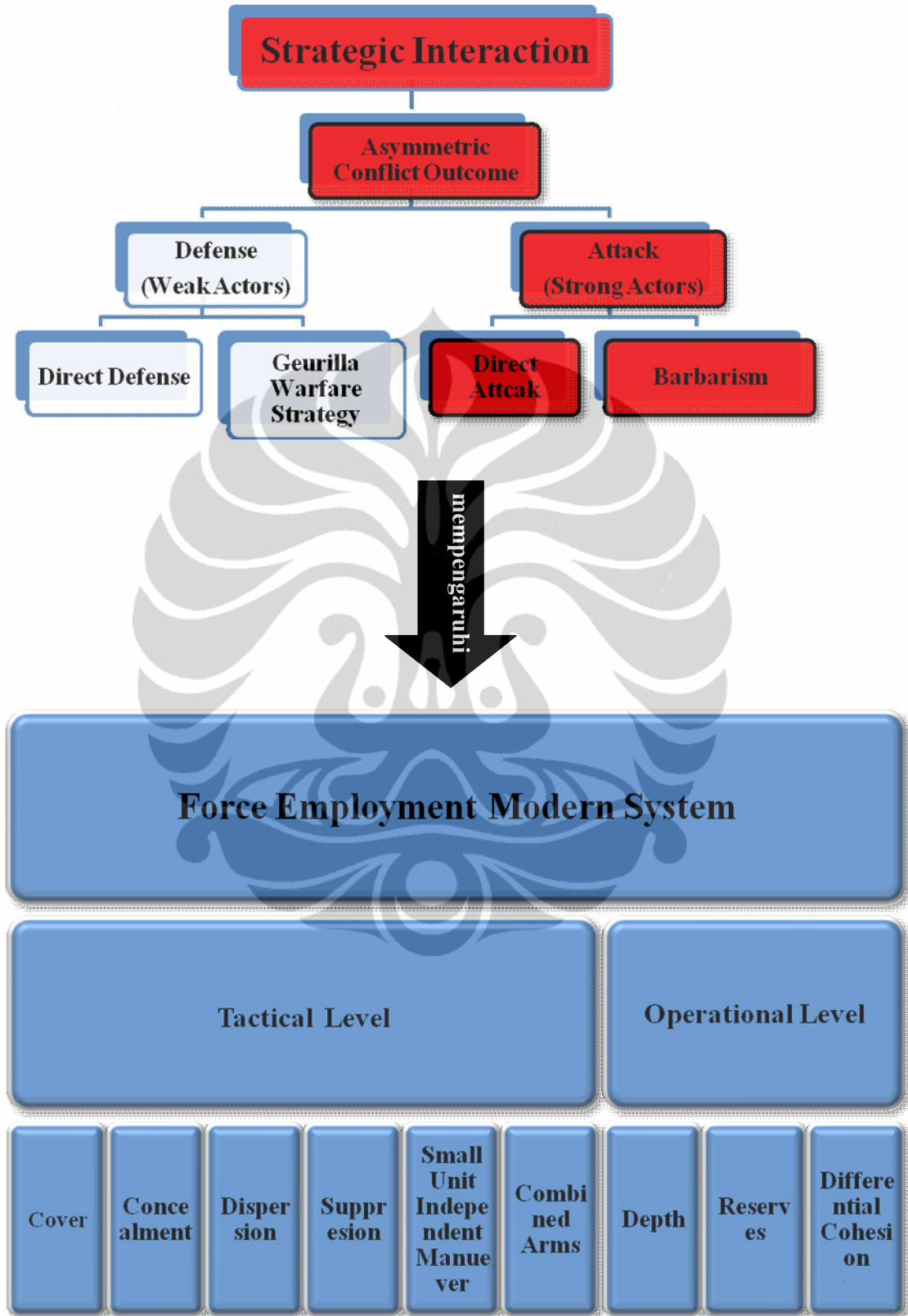
1.8. Model Analisa

Model analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam diagram berikut ini :



1.9. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan dua pemikiran utama yaitu konsep ancaman asimetris dan teori *force employment* sebagai alat analisa dalam upaya untuk mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan nantinya konsep dan teori yang digunakan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang digunakan serta untuk menguji hipotesa sementara peneliti dalam melihat permasalahan diatas. Deskripsi dari keterkaitan antara keduanya, yang kemudian menjadi model analisa dari penelitian ini adalah sebagai berikut



1.10. Hubungan Antar Konsep

Hubungan antara kedua kerangka pemikiran seperti yang tercantum dalam pertanyaan penelitian dimana diharapkan perpaduan diantara keduanya dapat menjelaskan bagaimana seharusnya gelaran pasukan dilakukan setelah mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman asimetris yang berkembang pasca tragedi pengeboman di Amerika Serikat. Tentunya perubahan lingkungan strategisnya baik regional, maupun internasional akan berpengaruh terhadap cara pandang suatu negara dalam memahami dan memaknai konsep keamanan secara komprehensif. Sehingga akan mempengaruhi setiap negara dalam bertindak untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman-ancaman yang muncul baik secara internal maupun eksternal. Perkembangan lingkungan regional saat ini diwarnai dengan berbagai ancaman non-konvensional yang berpeluang mengancam kedaulatan wilayah Indonesia, baik lewat darat, laut maupun udara. Perkembangan lingkungan regional tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan strategis suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dimana strategi gelar pasukan Indonesia masih melihat ancaman dari dalam negeri sebagai ancaman yang paling berpotensi terjadi dan mengancam kedaulatan bangsa, sementara ancaman dari luar belum mendapatkan perhatian lebih sebagai ancaman lintas negara yang terjadi di wilayah terluar negara Indonesia.

Analisa terhadap maraknya ancaman asimetris apakah akan mempengaruhi strategi gelar pasukan Indonesia dalam melihat ancaman-ancaman yang berasal dari eksternal wilayah kedaulatannya atukah strategi gelar pasukan lebih memperhatikan ancaman-ancaman yang bersifat internal dan menganggap nihil atau minim ancaman yang berasal dari luar. Perpaduan antara keduanya diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Serta mampu untuk menguji hipotesa sementara peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.11. Prosedur dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan berupaya untuk melakukan analisa terhadap strategi gelar pasukan Indonesia yang mana lebih berorientasi kepada pengamanan dalam negeri sedangkan ancaman-ancaman asimetris saat ini marak terjadi dan mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan demikian, penulis menggunakan teori *Force Employment Modern System* dan teori *Asymmetric Conflict Outcome* dalam penelitian ini untuk melihat hubungan antar-variabel dependen dan independen sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Analisa strategi gelar pasukan Indonesia sebagai sebuah skema pelaksanaan pertahanan yang komprehensif yang tidak hanya berorientasi secara internal terhadap ancaman-ancaman yang mungkin muncul tetapi juga berorientasi eksternal, mengantisipasi ancaman-ancaman yang muncul dari luar ini akan dilakukan dengan melihat pola hubungan antarvariabel : dependen dan independen atau interaksi sebab akibat antarvariabel : dependen dan independen, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataan realitas sosial.³⁴

Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif.³⁵ Analisa yang dilakukan akan menggunakan teknik pengumpulan data yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pertahanan terlebih tentang kebijakan strategi pertahanan Indonesia yang secara resmi dirumuskan dan dijabarkan oleh pemerintah.

Pengumpulan data-data yang terkait dilakukan melalui berbagai sumber, seperti Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI yang berada di Depok, *website-website* yang memuat data-data yang terkait dengan penelitian ini, jurnal-jurnal seperti Jstor, Proquest dan lain

³⁴ Lawrence W. Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc (fifth edition), 2003, h. 32.

³⁵ *Ibid*, h. 72.

sebagainya serta sumber-sumber lainnya seperti lembaga-lembaga penelitian maupun departemen-departemen yang terkait.

1.12. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi kedalam lima bab. Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang, yang berisi tentang kesenjangan antara gelar pasukan Indonesia dengan ancaman-ancaman asimetris yang marak terjadi di wilayah Asia Tenggara dimana strategi gelar pasukan hanya ditujukan untuk stabilitas keamanan dalam negeri saja, berikut pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan.

Dalam bab selanjutnya atau bab dua menjelaskan tentang perubahan kondisi kawasan Asia Tenggara, dan akan lebih spesifik menjelaskan terorisme sebagai ancaman asimetris yang akan di teliti dalam penelitian ini. Serta kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Pada bab ketiga akan menjelaskan tentang strategi gelar pasukan Indonesia yang lebih berorientasi kepada potensi-potensi konflik yang berasal dari dalam negeri sementara ancaman-ancaman yang berasal dari luar belum mendapatkan perhatian lebih.

Bab keempat akan menjelaskan tentang hubungan antara ancaman-ancaman asimetris, sebagai variabel independen dengan strategi gelar pasukan Indonesia sebagai variabel dependennya, sekaligus sebagai kerangka analisa dari tesis ini yang menjelaskan sebab-akibat atau interaksi antara variabel independen dan dependen untuk menguji hipotesa.

Pada bab kelima atau bab terakhir berisi kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan saran atas permasalahan penelitian.

BAB II

DINAMIKA PERUBAHAN ANCAMAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Dinamika perubahan lingkungan strategis suatu negara baik yang terjadi pada tingkat nasional, regional maupun global akan turut serta mempengaruhi kebijakan strategisnya. Sehingga pemahaman akan setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis suatu negara sangatlah penting karena lingkungan strategis merupakan arena bagi negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing.

Pada periode pasca peristiwa pengeboman *World Trade Centre* (WTC) hingga sekarang ini, dunia internasional dihadapkan pada perubahan ancaman yang berkembang, dimana ancaman berupa militer diperkirakan akan sulit terjadi, invasi dari negara lain akan sulit untuk dilakukan. Namun, ancaman nirmiliter akan terus berkembang. Perubahan wajah ancaman dari ancaman tradisional ke ancaman non-tradisional berimplikasi terhadap persepsi suatu negara dalam melihat potensi ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya. Dengan semakin maraknya ancaman-ancaman yang bersifat non-tradisional memaksa setiap negara untuk dapat merumuskan kebijakan strategis yang dapat memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya tentunya kebijakan-kebijakan strategis yang dirumuskan haruslah disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang muncul serta kondisi geografis negaranya.

Ancaman transnasional seperti terorisme menjadi ancaman asimetris tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Aksi terorisme yang dilakukan oleh beberapa kelompok, di Asia Tenggara semakin marak terjadi dikarenakan adanya kelemahan persepsi pemerintah dalam mengklasifikasikan ancaman terorisme tersebut. Maraknya ancaman terorisme diduga terkait erat dengan jaringan yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris Asia Tenggara dengan jaringan terorisme internasional pimpinan Osama bin Laden, Al-Qaeda.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang : pertama, ancaman asimetris yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini isu terorisme sebagai ancaman paling nyata yang dihadapi oleh kawasan ini serta kebijakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut. Kedua, menjelaskan tentang strategi pertahanan yang diterapkan dalam menghadapi isu terorisme.

2.1. Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara

Typology of six potential asymmetric threats: nuclear, chemical, biological, information operations, operational concepts, and terrorism. These six categories of threats are logical descendants of asymmetric approaches used through-out history. The greatest change at the beginning of the 21st century, how-ever, is the dramatically increasing effectiveness of technology and its ability to create global effects from local events.¹

Ancaman asimetris dewasa ini telah mempengaruhi dunia internasional secara signifikan. Ancaman asimetris memberikan warna tersendiri dalam dinamika interaksi antar negara-negara di berbagai kawasan. Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal. Sementara itu, dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terdapat konflik antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial.²

Semakin maraknya ancaman asimetris yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dewasa ini, semakin mengancam stabilitas keamanan di kawasan. Hal ini merupakan bahaya terhadap perdamaian yang telah tercipta diantara negara-negara di Asia Tenggara. Dalam perkembangan dunia internasional sekarang ini, terjadi pergeseran dinamika ancaman yang terjadi pasca tragedi WTC, dunia tidak lagi diperhadapkan pada perang yang sifatnya konvensional. Akan tetapi dunia

¹ Kenneth F. McKenzie, Jr., *The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning*, Chapter Three, 2001.

² Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 15.

dewasa ini di hadapkan pada perang yang sifatnya non-konvensional dan transnasional. Disamping gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan yang bersifat konvensional (*ordinary crimes*) dan yang menyangkut kekayaan negara, seperti keuangan negara (korupsi), kekayaan hasil laut (*illegal fishing*) dan hasil hutan (*illegal logging*), kita harus menghadapi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*).³

Dewi Fortuna Anwar mengungkapkan bahwa : Ancaman-ancaman potensial tersebut datang dari tindakan kejahatan, sabotase, terorisme, dan subversif hingga krisis-krisis seperti pemberontakan bersenjata, perang terbatas dan perang terbuka, serta bersifat multidimensional seperti dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan militer.⁴ Sehingga terjadi perang jenis baru yang dikenal dengan perang asimetris. Perang asimetris adalah perang yang terjadi antara dua belah pihak yang secara kekuatan tidak seimbang baik secara kekuatan persenjataannya, jumlah personil maupun strategi yang digunakan. Perang asimetris bisa terjadi antara negara dan aktor non-negara.

Kondisi keamanan global diwarnai oleh meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara. Aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan merupakan bentuk ancaman keamanan lintas negara yang paling menonjol.⁵

Perang asimetris sebagai pengaruh kekuatan operasional dan taktik yang inferior terhadap kerentanan dari lawan yang superior untuk mencapai dampak ketidakseimbangan dengan maksud merusak kemampuan lawan dalam memberikan perintah untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dari aktor-aktor

³ Irjen. Pol. Dr. Farouk Muhammad, Keamanan Domestik; Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Denpasar, 14-18 Juli 2003.

⁴ Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia at Large; collected writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratization*, Jakarta; The Habibie Centre, 2006.

⁵ Strategi Pertahanan Indonesia 2008, h. 13.

asimetris.⁶ Jelas bahwa ancaman dan perang asimetris ditujukan untuk merusak tatanan bernegara dan berbangsa sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam negara yang mana mengarah pada terancamnya persatuan dan kesatuan suatu negara. Bentuk ancaman seperti ini sangatlah berbahaya terhadap kedaulatan wilayah suatu negara dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuannya, dalam hal ini ancaman asimetris yang berkembang haruslah dilihat sebagai salah satu ancaman yang paling berbahaya bagi stabilitas keamanan negara dan kawasan tempat negara tersebut berperan. Peningkatan kemampuan pertahanan menjadi pilihan yang tepat dalam upaya menangkal dan menindak ancaman-ancaman tersebut sebelum masuk dan bermain di wilayah darat suatu negara. Keanekaragaman bentuk ancaman yang dapat mengancam suatu negara haruslah di hadapi dengan strategi yang berbeda pula penanganannya, terorisme merupakan salah satu ancaman asimetris yang perkembangannya sangat mengancam stabilitas keamanan suatu negara maupun regional dan global. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kekuatan pertahanan dan kerjasama antar negara dalam upaya untuk memberantas terorisme yang semakin berkembang di dunia internasional sekarang ini.

Terorisme menjadi salah satu ancaman asimetris yang berkembang di wilayah Asia Tenggara, terorisme dianggap sebagai ancaman yang paling nyata terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam pelaksanaan aksinya kelompok terorisme lebih melaksanakan strategi gerilya dalam menjalankan aksinya, pilihan ini menjadi lebih tepat pada saat terjadinya perang asimetris dimana kelompok-kelompok terorisme merupakan pihak yang lebih inferior di bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

2.2. Terorisme Sebagai Ancaman Paling Nyata di Asia Tenggara

Istilah terorisme dan teroris memiliki persamaan makna dan motif yang terkait. Defenisi dari teroris adalah seorang individu atau

⁶ Kenneth F. McKenzie, Jr., *The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning*, Chapter Three, 2001.

sebuah kelompok yang mana terlibat dalam aktivitas teroris baik secara langsung maupun tidak langsung (mendalangi). Di sisi lain, terorisme di definisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh person atau sebuah kelompok dengan kekuatan tanpa persetujuan dari musuh dan menggunakan senjata api dan lainnya.⁷

Terorisme merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme dapat juga didefinisikan sebagai : ancaman atau tindakan secara politik yang termotivasi pada kekerasan secara langsung terutama kepada masyarakat sipil.⁸ Memang belum ada definisi yang jelas tentang terorisme. Namun, dilihat dari beberapa definisi yang disebutkan diatas, terdapat beberapa kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme, yakni :

pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis (kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan / kekejaman / penganiayaan fisik); penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik; adanya unsur pendadakan/kejutan; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya; sasaran pada umumnya nonkombatan; direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.⁹

“Domestic terrorism refers to activities that involve acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any state; appear to be intended to intimidate or coerce a civilian population; to influence the policy of a government by

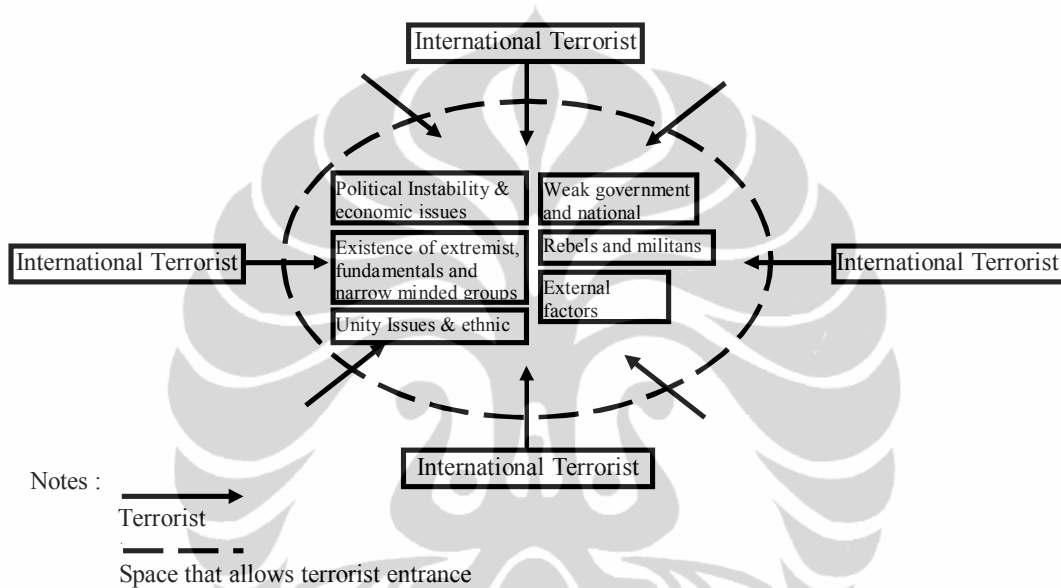
⁷ K.S. Balakrishnan, *Keganasan antarabangsa dan kerjasama ASEAN (The international terrorism and ASEAN cooperation)*. Jurnal Pemikir (29). July –September. 2002.

⁸ Steven Graeme C.S. & Rohan Gunaratna, *Counterterrorism: A Reference Handbook* (St. Barbara, California: Contemporary World Issues, 2004).

⁹ Alex Schmid, *Political Terrorism; A Research Guide*. New Brunswick, N.J.: Trans Action Books, 1984, seperti dikutip dalam Walter Lacqueur, “reflection on Terrorism,” *Foreign Affairs*, Fall 1980.

mass destruction, assassination, or kidnapping; and, occur primarily within the territorial jurisdiction of the United States” .¹⁰

Grafik 2.1. Elemen-Elemen yang Menjadi Pintu Masuk Teroris Internasional ke dalam Negara



sumber *The Problems of Terrorism in Southeast Asia*, Journal of Asia Pacific Studies, 2009.¹¹

Diagram diatas merupakan diagram *entry point* atau pintu masuknya jaringan teroris internasional ketika kondisi negara dalam keadaan tidak stabil, pemerintah yang lemah, eksistensi dari ekstrimis di internal dan berbagai isu internal lainnya yang dapat menggoyahkan keamanan dalam negeri suatu negara. Dapat dilihat juga bahwa terorisme berasal dari luar wilayah suatu negara yang masuk melalui berbagai elemen-elemen yang dianggap lemah, sehingga terorisme cepat berkembang di dalam negara sendiri dan mengancam kedaulatan suatu

¹⁰ Counterterrorism Division Federal Bureau of Investigation (FBI).

¹¹ Gregory Rose, and Diana Nestorovska, *Asean Features : Towards an asean counter-terrorism treaty*, Singapore Year Book of International Law and Contributors , 2005.

negara. Ketidakmampuan negara dalam menjaga elemen-elemen tersebut akan sangat rentan terhadap terpecah belahnya persatuan dan kesatuan negara.

Terorisme yang kini tengah menjadi perhatian utama dunia itu sesungguhnya telah lama hadir di berbagai belahan dunia. Kecenderungan ini muncul terutama sejak dekade 1960-an, ketika kekerasan politik meningkat di seluruh dunia.¹² Munculnya terorisme menurut Sukawarsini Djelantik merupakan efek dari meningkatnya tensi politik yang terjadi di seluruh dunia, jadi dapat disimpulkan bahwa terorisme muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap tujuan-tujuan politik yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi, terorisme muncul dengan memiliki tujuan yang berbeda dengan pemerintah yang berdaulat.

Bagi Indonesia, aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini terorisme merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa tidak saja oleh polisi dan militer, tetapi juga oleh ilmuwan, ulama, dan tokoh-tokoh agama. Dari berbagai kasus terorisme juga terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional, sekaligus domestik (intermestik).¹³

Dalam rangka mencapai tujuan politiknya, maksud-maksud suatu kelompok melakukan terorisme antara lain :

1. Memperoleh konsensi-konsensi tertentu, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan politik, penyebarluasan pesan, dan sebagainya
2. Memperoleh publisitas luas

¹² Djelantik Sukawarsini, "Teroris Internasional: Aktor Bukan Negara Dalam Hubungan Internasional", dalam *Perubahan Global dan Perkembangan studi Hubungan Internasional*, Editor Andre H. Pareira, *Parahyangan Centre For International Studies (PACIS)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h. 173.

¹³ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h. 21.

3. Menimbulkan kekacauan luas, demoralisasi dan disfungsi sistem sosial
4. Memancing retalisasi dan atau kontrateror dari pemerintah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan situasi yang akan menguntungkan para teroris yang akhirnya bahkan mungkin dapat menggulingkan pemerintah
5. Memaksakan kepatuhan dan ketaatan
6. Menghukum yang bersalah, atau dipandang sebagai simbol sesuatu yang jahat/salah, seperti orang-orang yang tidak setuju dengan tujuan perjuangan mereka, bekerja sama dengan penguasa, bergaya hidup yang bertentangan dengan paham mereka dan sebagainya).¹⁴

Tabel 2.1. Tujuan-Tujuan Politik Aksi Terorisme

Tujuan-Tujuan Politik Aksi Terorisme
Memperoleh konsensi-konsensi tertentu, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan politik, penyebarluasan pesan, dan sebagainya
Memperoleh publisitas luas
Menimbulkan kekacauan luas, demoralisasi, dan disfungsi sistem sosial
Memancing retalisasi dan atau kontrateror dari pemerintah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan situasi yang akan menguntungkan para teroris yang akhirnya bahkan mungkin dapat menggulingkan pemerintah

¹⁴ A. Hasnan Habib, *“Terorisme Internasional, “Dalam Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997, h. 573.*

Memaksakan kepatuhan dan ketaatan

Menghukum yang bersalah, atau dipandang sebagai simbol sesuatu yang jahat/salah, seperti orang-orang yang tidak setuju dengan tujuan perjuangan mereka, bekerjasama dengan penguasa, bergaya hidup yang bertentangan dengan paham mereka dan sebagainya.

Sumber diolah dari A. Hasnan Habib, "Terorisme Internasional, "Dalam Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional, Jakarta: *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, 1997.¹⁵

Tujuan-tujuan lain dari aksi terorisme yang selama ini dijalankan oleh kelompok terorisme adalah sebagai berikut :

1. Membuat dan menyebarluaskan rasa takut
2. Memperoleh pengakuan dari dunia, nasional, atau lokal melalui menarik perhatian media
3. Mengganggu, melemahkan, atau membingungkan aparat keamanan pemerintah sehingga
4. memaksa pemerintah bertindak overreactiv dan represif
5. Mencuri uang atau peralatan, khususnya senjata dan amunisi penting untuk mendukung operasi mereka
6. Merusak atau mengganggu fasilitas saluran komunikasi untuk menciptakan keraguan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan dan melindungi warga negara nya
7. Menghambat investasi asing, pariwisata, atau program-program bantuan yang dapat mempengaruhi target ekonomi negara dan yang dapat mendukung pemerintah yang sedang berkuasa
8. Mempengaruhi keputusan pemerintah, undang-undang, atau keputusan penting
9. Pembebasan tahanan
10. Memuaskan hati mereka/Kepuasan pribadi
11. Menerapkan taktik perang gerilya dimana memaksa pemerintah untuk memusatkan perhatian aparat keamanan di wilayah perkotaan. agar

¹⁵ *Ibid*, h. 10.

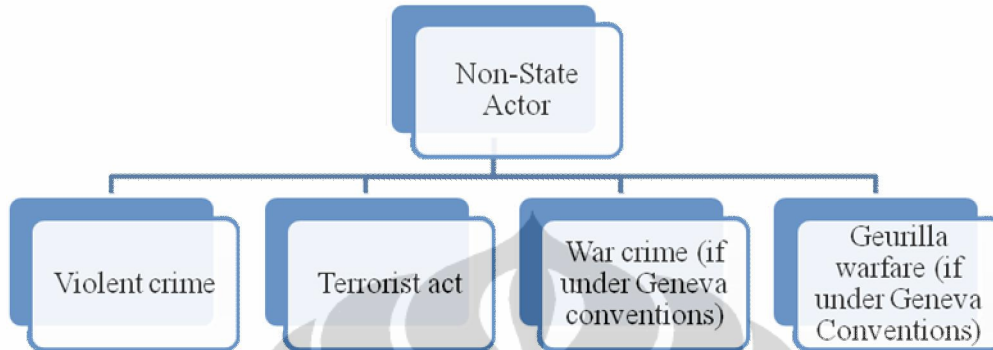
memungkinkan untuk membentuk sel-sel baru dengan merekrut rakyat lokal di daerah pedesaan.¹⁶

Perbedaan pandangan dan tujuan yang ingin dicapai menjadi alasan bagi sejumlah kelompok dalam melakukan aksi terorisme, pada umumnya negara, dalam hal ini pemerintah dianggap sebagai pihak yang salah. Dampaknya terjadi ketidakpuasan kelompok-kelompok tersebut terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini semakin menimbulkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Sehingga memunculkan potensi konflik yang dipandang sebagai konflik internal dalam negara.

Pasca tragedi 11 September 2001, terjadi pergeseran dan perubahan paradigma keamanan global. Dunia tidaklah memandang ancaman yang berpotensi muncul adalah ancaman yang sifatnya militer, dengan munculnya tragedi tersebut paradigma keamanan mengalami perubahan dari ancaman yang bersifat militer bertransformasi ke ancaman yang bersifat nirmiliter. Salah satu ancaman yang paling nyata adalah ancaman terorisme, hal ini seiring dengan kebijakan Amerika Serikat pasca terjadinya pengeboman *World Trade Centre* (WTC). Sehingga berdampak pada perubahan konsep-konsep keamanan dari setiap negara. Dalam upaya untuk penanganan terorisme, hubungan antar negara juga semakin menguat karena diperlukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan menempatkan terorisme sebagai agenda utama pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara.

¹⁶ *Tujuan dan Motivasi Teroris Translated*, 22 September 2010 04:00 Translated by Mayor polsan Situmorang Sumber Terrorism-Research.com-Privacy Policy, h. 2.

Grafik 2.2. Teror dan Fungsi Lain dari Aktor Non-Negara



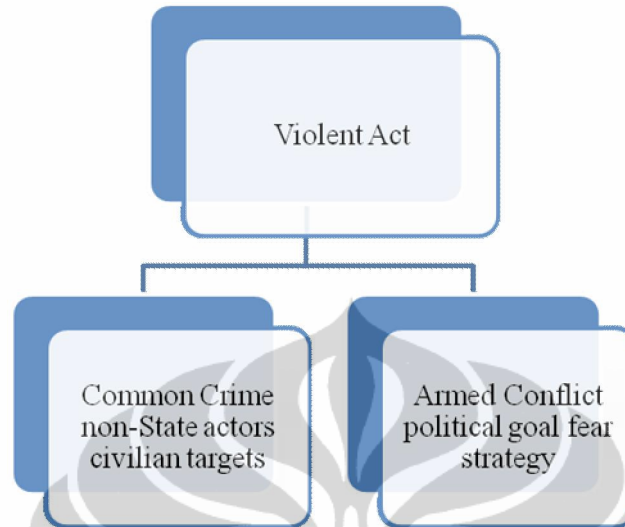
Sumber Gregory Rose and Diana Nestorovska, *Asean Features : Towards an asean counter-terrorism treaty*, 2005.¹⁷

Dalam perspektif strategi pertahanan, isu terorisme membawa beberapa implikasi. Pertama, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengancam jiwa manusia dan mengancam seluruh negara. Kedua, sebagai ancaman nyata, isu terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi; sehingga menuntut kesiapsiagaan yang prima. Ketiga, penanganan terorisme memaksa adanya peningkatan kerja sama pertahanan menjadi lebih intensif dan progresif. Keempat, penanganan terorisme dengan menggunakan kekuatan militer menjadi salah satu pilihan strategi pertahanan, sehingga harus ada aturan yang jelas agar tidak berbenturan dengan norma-norma demokrasi dan hak azasi manusia.¹⁸

¹⁷ Gregory Rose and Diana Nestorovska, *Asean Features : Towards an asean counter-terrorism treaty*, Singapore Year Book of International Law and Contributors , 2005, h. 163.

¹⁸ Postur Pertahanan Negara 2009 – 2029, h.6.

Grafik 2.3. Elemen-Elemen Tindakan Teroris



Sumber Gregory Rose and Diana Nestorovska, *Asean Features : Towards an asean counter-terrorism treaty*, 2005.¹⁹

Hampir semua negara di ASEAN merasakan dampak pengeboman WTC pada 11 september 2001 yang lalu, tidak terkecuali Indonesia yang merupakan negara islam terbesar di dunia, dampak yang dirasakan dari kejadian tersebut adalah munculnya kekhawatiran akan terjadinya serangan teroris. Ada dua faktor mengapa kawasan Asia Tenggara menjadi tempat yang dipilih oleh para teroris internasional untuk berkembang dewasa ini, Pertama, mayoritas penduduk di kawasan ini beragama Islam, yakni agama yang sama dengan yang dipeluk oleh Osama bin Laden. Kedua, kawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.²⁰

¹⁹ Gregory Rose and Diana Nestorovska, *Asean Features : Towards an asean counter-terrorism treaty*, Singapore Year Book of International Law and Contributors , 2005, h. 160.

²⁰ Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook 2003*, Japan: Japan Center for International Exchange, 2003; Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook 2004*, Japan: Japan Center for International Exchange, 2004; Dr. Bambang Cipto, MA, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis dan Iptek. Ancaman terorisme berkembang secara meluas dan menjadi ancaman global. Aksi-aksi teror bersenjata terjadi di sejumlah negara. Ancaman Terorisme tidak saja bersifat internasional dengan jaringan yang bersifat lintas negara, tetapi juga terdapat terorisme pada tingkat lokal. Ancaman Terorisme pada tingkat lokal tersebut telah pula mengadopsi pola dan metode terorisme internasional, atau bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Dari sejumlah aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para tokoh terorisme untuk memperluas jaringan dengan membangun kader-kader baru.

Dimensi ancaman terorisme sebagai ancaman militer adalah sifat ancaman tersebut yang tidak memandang atau memilih-milih target, sehingga ancaman terorisme mengancam keselamatan bangsa. Atas dasar pertimbangan dan alasan strategis tersebut, maka ancaman terorisme menjadi ancaman pertahanan yang berdimensi militer.

Keberhasilan pemerintah Thailand dalam memberantas aksi terorisme yang terjadi di internal wilayahnya, hal yang sama terjadi pula pada Indonesia dimana pemerintah Indonesia dianggap berhasil dalam pemberantasan terorisme, namun, kawasan Asia Tenggara masih menjadi wilayah yang dianggap paling cocok untuk tempat perluasan jaringan terorisme internasional.

Sebuah survey yang dilakukan pada kurun waktu 1984 – 1996 menunjukkan bahwa aksi terorisme di Asia Tenggara merupakan yang paling

sedikit terjadinya aksi terorisme dengan jumlah 186 aksi, paling rendah dibandingkan dengan Eropa yang mengalami 2.073 kejadian, Amerika Latin 1.621 kejadian, Asia Barat 1.292 kejadian, dan Afrika dengan 362 kejadian terorisme.²¹

Tabel 2.3. Jumlah kejadian terorisme internasional 1984 – 1996

Kawasan	Jumlah Kejadian
Eropa	2.073
Amerika Latin	1.621
Asia Barat	1.292
Afrika	362
Asia Tenggara	186

Sumber : Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh “*Terrorism in Southeast Asia: How Real is the Threat*”, *The Indonesian Quarterly*, vol. XXX, No. 1, First Quarter, 2002.²²

Walaupun Asia Tenggara menjadi wilayah yang paling sedikit terkena aksi terorisme internasional, namun regional Asia Tenggara menjadi pusat perhatian dunia mengenai kejahatan terorisme. Hal ini disebabkan maraknya organisasi-organisasi islam yang diduga sebagai kelompok-kelompok terorisme yang berkaitan dengan teroris internasional yang selama ini dikenal dengan Al-Qaeda, pimpinan Osama Bin Laden, orang nomor satu yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat. Terorisme di Asia Tenggara nampaknya telah muncul beberapa kali, yang mana dapat dikategorisasikan ke dalam dua tipe; terorisme berbasis

²¹ Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh “*Terrorism in Southeast Asia: How Real is the Threat*”, *The Indonesian Quarterly*, vol. XXX, No. 1, First Quarter, 2002, h. 38.

²² *Ibid.*

agama (terorisme agama) dan terorisme yang muncul menurut ketidakstabilan politik dan kelemahan pemerintah suatu negara.

Walaupun demikian, Asia Tenggara menjadi wilayah yang paling disorot oleh dunia internasional terkait dengan isu terorisme ini. Wilayah ini telah menarik perhatian dunia ketika pergerakan terorisme berkembang seperti “Front Jemaah Islamiyah” (Indonesia, Kelompok Abu Sayyaf dan Front Pembebasan Islam Moro (Filipina), Front Pembebasan Pattani (Thailand) dan kelompok Militan Malaysia (Malaysia) yang mana berpotensi mengancam keamanan wilayah Asia Tenggara.²³ Mahmud mengatakan bahwa terorisme di Asia Tenggara juga berhubungan dengan elemen-elemen agama. “jemaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Kelompok Militan Malaysia (KMM) adalah kelompok teroris dibawah pimpinan Abu Bakar Baasyir dengan target untuk mendirikan Daulah Islamiyah Raya, sebuah negara islam besar yang meliputi Indonesia, Thailand Selatan, Filipina dan Singapura.²⁴

Tentunya pernyataan diatas bukanlah pernyataan yang fiktif, dapat dilihat pada tabel 2.5 bahwa Asia Tenggara, terlebih Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering mengalami terjadinya aksi terorisme. Stabilitas kawasan pun menjadi tidak aman dengan maraknya terorisme di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Kekuatiran dan dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, terhadap ancaman dan akibat yang disebabkan kejahatan transnasional semakin besar. Serangan WTC dan Bom Bali telah menjadi bukti bahwa upaya negara-negara dalam memerangi terorisme belum berhasil sepenuhnya dan melihat perkembangan ini nampaknya dunia masih dibayangi oleh ancaman terorisme internasional yang juga bermain di lingkup kawasan.

²³ Zin Mahmud, *Osama Masih Jadi Ancaman (Osama still a threat)*. Massa. No.370, 23-29 November 2002, hal 46.

²⁴ Ibid, 47

**Tabel 2.4. Organisasi-Organisasi yng diduga sebagai pelaku
terorisme di Asia Tenggara.**

Kelompok	Negara
Kelompok Abu Sayyaf dan MILF	Filipina
Front Pembebasan Pattani	Thailand
Kelompok Mllitan Malaysia	Malaysia
Jemaah Islamiyah	Indonesia

Sumber diolah Jurnal Studi Asia Pasifik, 2009.²⁵

Menurut Buku Putih Pertahanan Singapura, dimana dokumen ini memberikan pandangan yang lebih rinci tentang ancaman terorisme yang berkembang baik secara global maupun regional. Dokumen ini menjelaskan latar belakang sejarah, strategi, operasionalisasi serangan, bahkan jaringan kelompok terorisme Jemaah Islamiyah yang terkait dengan Majelis Mujahidin Indonesia, Kumpulan Militer Malaysia, *Moro Islamic Liberation Front* di Filipina, serta jaringan terorisme internasional Al-Qaeda.²⁶

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini Indonesia, marak terjadi. Tempat yang menjadi sasaran aksi terorisme pun beraneka ragam, tidak hanya fasilitas negara yang menjadi sasaran peledakan tetapi juga pusat perbelanjaan dan tempat-tempat ibadah keagamaan. Keanekaragaman tempat yang menjadi sasaran peledakan bom di Indonesia menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

²⁵ *The Problems of Terrorism in Southeast Asia*, Journal of Asia Pacific Studies, Vol 1, No 1, 27-48, 2009, h. 27.

²⁶ White Paper, *The Jemaah Islamiyah and The Threat of Terrorism*, Ministry of Home Affairs, Republic of Singapore, 2003.

Tabel 2.5. Serangkaian Kejadian Terorisme di Indonesia

No	Tanggal Kejadian	Tempat Kejadian
1	2 Januari 1999.	Peledakan Toserba Ramayana Jakarta
2	9 Februari 1999.	Peledakan Mal kelapa Gading Jakarta
3	15 April 1999.	Peledakan Plaza Hayam Wuruk Jakarta
4	Tahun 1999	Peledakan mesjid Istiqlal
5	28 Mei 2000 & 29 Mei 2000	Peledakan Gereja (GKPI) dan Gereja Khatolik
6	4 Juli 2000.	Peledakan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta
7	1 Juli 2000.	Peledakan kantor Komisi Pemilu (KPU) Jakarta
8	1 Agustus 2000	Peledakan di halaman Kedutaan Besar Filipina
9	30 Agustus 2000,	Peledakan di depan kantor Departemen Pertanian
10	13 September 2000	Peledakan gedung Bursa Efek Jakarta
11	1 Agustus 2001 dan 23 September 2001.	Peledakan gedung Atrium Senen Jakarta
12	Malam Natal tahun 2000 dan 2001.	Peledakan sejumlah gedung gereja
13	12 Oktober 2002	Peledakan di Bali
14	5 Desember 2002	Peledakan Mc Donald, Mal Ratu Indah
15	3 Februari 2003.	Peledakan Wisma Bhayangkari di Kompleks Mabes Polri

Sumber diolah dari Buku Putih Pertahanan Indonesia: *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003.²⁷

Howard menunjukkan bahwa terorisme adalah salah satu metode dalam perang. Aksi dari terorisme berdasar pada tiga tujuan utama, yakni :

1. Untuk menginisiasikan propaganda atau menarik perhatian internasional dengan menampilkan kemampuannya.
2. Untuk menyedarkan musunya.
3. Untuk memprovokasi dan menjamin musuh-musuhnya melemah yang menatik simpati internasional sehingga suatu tujuan dapat terpenuhi.²⁸

Aktivitas teroris sulit untuk dideteksi Karena kelompok-kelompok memiliki sebuah sistem jaringan global dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri bagi negara-negara dalam upaya pemberantasan terorisme. Terlebih lagi, kelompok terorisme secara konstan berpinda, yang mana lokasi dan posisi dari kelompok sulit untuk dilacak, sebauahhasil dari jaringan yang terintegrasi. Contohnya, Al-Qaeda yang beroperasi di seluruh dunia seharusnya tidak terhubung atau terlindungi oleh suatu negara, khususnya negara-negara islam. Ancaman terorisme tidak saja bersifat internasional dengan jaringan yang bersifat lintas negara, tetapi juga terdapat terorisme pada tingkat lokal. Ancaman terorisme pada tingkat lokal tersebut telah pula mengadopsi pola dan metode terorisme internasional, atau bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Dari sejumlah aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, tampak adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para aktor

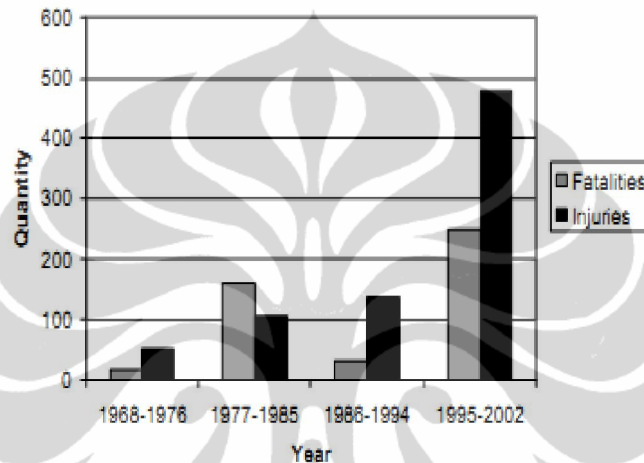
²⁷ Buku Putih Pertahanan Indonesia: *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003, h. 38-39.

²⁸ Michael Howard, *Modernization The Right Way To Defeat Terrorist*. New Straits Times, 16 September 2001, h. 21.

teroris untuk memperluas jaringan dengan membangun dan merekrut kader-kader baru.

Grafik 2.5. Jumlah Kematian dan Luka-Luka Akibat Aksi Terorisme di Asia Tenggara dan

(Fig.2) Fatalities and injuries caused by international terrorist attacks in Southeast Asia and Oceania



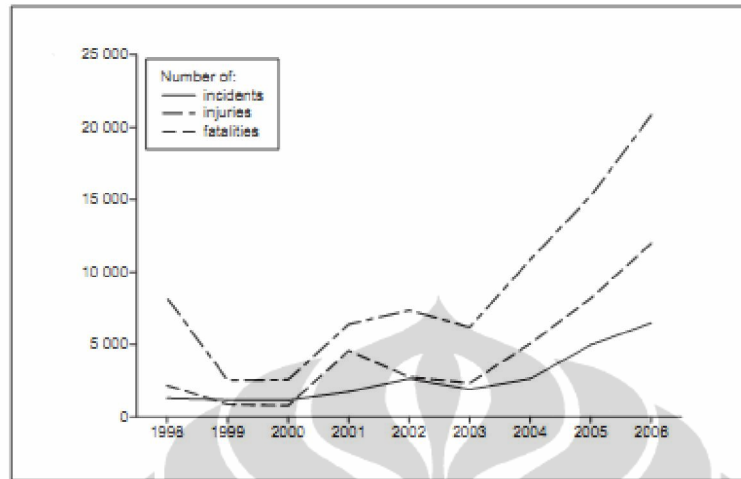
Oseania

Sumber dari *The RAND Terrorism Chronology available at, Conflict resolution of terrorist conflicts in Southeast Asia?* http://db.mipt.org/rep_inrg_rep.cfm.²⁹

Diagram diatas menunjukkan peningkatan jumlah kematian dan luka-luka yang disebabkan oleh maraknya aksi terorisme di dunia global. Maraknya ancaman aksi terorisme yang terjadi di Indonesia memberikan gambaran bahwa aksi terorisme semakin menjadi ancaman yang dianggap paling berbahaya bagi stabilitas keamanan suatu negara karena aksi yang dilakukan tidak memiliki target tertentu dan seringkali dilakukan ditempat-tempat yang ramai sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Alasan lain adalah terorisme juga merupakan kejahatan yang tidak kentara pelakunya maupun strategi serta target aksinya, terorisme juga memiliki efek yang sangat besar terhadap stabilitas keamanan baik di suatu kawasan maupun dalam lingkungan global.

²⁹ *The RAND Terrorism Chronology available at, Conflict resolution of terrorist conflicts in Southeast Asia?* http://db.mipt.org/rep_inrg_rep.cfm.

Grafik 2.6. Jumlah Kejadian, Kematian dan Kerugian Akibat Terorisme



Sumber *MIPT Terrorism Knowledge Base*, <http://www.tkb.org>, dalam Peter Chalk, dkk, *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia; A Net Assessment*, Published 2009 by the RAND Corporation.³⁰

Dari aksi-aksi terorisme tersebut, terbukti bahwa Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi jaringan terorisme internasional. Pola kegiatan para pelaku aksi terorisme membuktikan bahwa jaringan terorisme internasional berusaha melakukan perekrutan anggota dari masyarakat Indonesia.³¹

Berdasarkan matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.

³⁰ *MIPT Terrorism Knowledge Base*, <http://www.tkb.org>, dalam Peter Chalk, dkk, *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia; A Net Assessment*, Published 2009 by the RAND Corporation.

³¹ Strategi Pertahanan, 2007, h.24.

3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum ,dll. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.³²

Ciri terorisme ini menjelaskan bahwa walaupun kelompok-kelompok terorisme memiliki tujuan politik yang ingin dicapai namun dalam pelaksanaannya untuk pencapaian tujuan lebih digunakan metode-metode yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, memiliki organisasi yang baik yang diwujudkan melalui proses indoktrinasi dan disiplin tinggi dari para pengikutnya.

Adapun karakteristik Terorisme Dapat ditinjau dari 3 macam pengelompokan yaitu :

1. Karakteristik Organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.
2. Karakteristik Perilaku yang meliputi : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup.
3. Karakteristik Sumber daya yang meliputi : latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.³³

Karakteristik tersebut memberikan gambaran bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, perkembangan terorisme sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Dilihat dari karakteristik terorisme diatas dapat dilihat bahwa kader-kader teroris yang baru diberikan doktrinasi yang menciptakan rasa berani dalam melakukan aksinya sehingga kader-kader tersebut tidak lagi segan-segan untuk melakukan aksinya. Tentunya karakteristik diatas semakin memberikan rasa takut mengingat bahwa

³² Kolonel Inf. Loudewijk F. Paulus, TERORISME, Kopassus, h, 10.

³³ *Ibid.* h. 13.

karakteristik diatas menciptakan rasa keberanian yang tinggi bagi para kader-kadernya.

2.3. Kebijakan Pemberantasan Terorisme

Dalam perang melawan terorisme, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN sepakat untuk menandatangani perjanjian bersama melawan terorisme, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACTT) yang ditandatangani pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 di Cebu Filipina 13 Januari 2007. Pemerintah Indonesia juga telah menjadikan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 sebagai dasar hukum dalam upaya tindak pidana terorisme. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Terorisme Tahun 1997 dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999.³⁴

Namun, upaya pemberantasan terorisme tidak hanya sampai disini saja, dengan mempertimbangkan bahwa ancaman terorisme juga merupakan ancaman yang bersifat transnasional oleh karena itu pemerintah Indonesia pun melakukan kerjasama dengan negara lain untuk secara bersama-sama melakukan pemberantasan aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah terorisme. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapabilitas, serta pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perkembangan ancaman terorisme dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Sementara itu dalam penanganan terorisme melalui pendekatan militer, secara hukum ancaman terorisme merupakan bagian dari fungsi pertahanan untuk melindungi segenap warganya.

Penanganan terhadap ancaman baik terorisme maupun ancaman transnasional lainnya merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana di

³⁴ Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008, h. 77.

amanatkan oleh Undang-Undang No.34 Tahun 2004³⁵ tentang Tentara Nasional Indonesia. Pola pendekatan yang digunakan adalah pola preventif dengan mengintensifkan peran dari intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus sebagai kekuatan responsif. Intelijen yang dimiliki oleh TNI berfungsi sebagai penyedia informasi tentang kegiatan-kegiatan terorisme. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pemanfaatan oleh para pelaku terorisme dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, intelijen harus mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dalam mengumpulkan informasi dan data tentang kelompok-kelompok terorisme.

Sementara itu dalam hal peningkatan infrastruktur aturan hukum, pemerintah sedang dalam tahap akhir proses ratifikasi dua konvensi internasional yaitu *International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism* (1999) dan *International Convention for the suppression of Terrorism Bombings* (1997) yang diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006. Guna menjamin dan melindungi keselamatan bangsa dari ancaman terorisme, terutama aksi teror bersenjata, fungsi pertahanan militer melalui unsur-unsur intelijen, unsur-unsur Komando Kewilayahan, berkewajiban untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengefektifkan fungsi deteksi dan cegah dini. Dalam hal penanggulangan aksi teror bersenjata yang dilakukan teroris, kesiapan dan kemampuan pasukan khusus antiteror yang dimiliki oleh TNI harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, dan penggunaannya sesuai keputusan politik dan peraturan perundang-undangan.³⁶

Penanganan terorisme juga mempengaruhi hubungan antarnegara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.³⁷ Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal serta pada skala terbatas muncul klaim teritorial sebagai akibat permasalahan perbatasan antarnegara yang tak kunjung selesai.³⁸ Dengan demikian, diperlukan suatu payung hukum bagi penyelenggara keamanan untuk

³⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

³⁶ Doktrin Pertahanan Indonesia, 2008, h. 27.

³⁷ Strategi Pertahanan Indonesia, 2007, h. 13.

³⁸ *Ibid*, h. 17.

dapat bertindak dan memberantas tindak kejahatan transnasional yang dapat merusak stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Sementara itu upaya-upaya negara-negara di Asia Tenggara dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap terorisme secara internal regional dilakukan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan dalam hal ini pengembangan infrastruktur aturan hukum. Tahun 2005, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Polandia, dengan ditandatanganinya *Agreement on Cooperation in Combating Transnational Crime and Other Types of Crime* dan dengan Vietnam telah ditandatangani *MoU on Cooperation and Combating Crime*. Secara multilateral, Indonesia terlibat dalam *ASEAN – Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*, *ASEAN – Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*, dan *ASEAN – New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*. *The ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Deklarasi ini merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional menghadapi terorisme, penyelundupan, pencucian uang, dan peredaran obat bius.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa :

”Kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme memiliki beberapa akar penyebab yang utama, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, ketidakadilan di berbagai wilayah dunia, dan akar-akar radikalitas itu sendiri. Terhadap itu semua, pembangunan yang kita lakukan justru bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan dan juga ketidakadilan. Oleh karena itu, strategi yang kita tempuh tetap memiliki dua sasaran; pertama, mengatasi akar-akar penyebab; dan kedua, langkah-langkah intensif untuk mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme kapanpun dan di manapun”³⁹.

³⁹ Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, *Mari Kita Bersatu dalam Melawan Aksi-Aksi Terorisme*, dalam Tabloid Palagan; Media Pemersatu Bangsa, edisi 41, September 2009, h. 5.

**Tabel 1.6. Kebijakan Pemberantasan Aksi Terorisme Masa Kepemimpinan
Megawati Soekarno Putri Dan Susilo Bambang Yudhoyono**

No.	Masa Kepemimpinan	Kebijakan
1.	Megawati Soekarno Putri (2001-2004)	<ol style="list-style-type: none">1. Mereformasi BAKIN menjadi BIN dan memberikan otoritas koordinasi khusus kepada kepala BIN di komunitas intelijen;2. Menyepakati kerangka kerjasama regional dan internasional untuk memernagi terorisme;3. Mengelurkan Perppu Anti-terorisme dan membentuk Detasemen Khusus Antiteror Polri sebagai respon atas peristiwa bom Bali 1.
2.	Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007)	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan terpadu dalam pemberantasan terorisme;2. Memperluas kerjasama regional dan internasional dalam pemberantasan terorisme;3. Membuka ruang dialog dengan kekuatan

		radikal dan memperkuat pranata demokrasi untuk meredam gejala radikalisme dan separatisme.

Sumber : Waluyo, *Kontra Terorisme* 2009 hal 39 & 44.⁴⁰

Berbagai kebijakan yang dirumuskan merupakan kesepakatan bersama negara-negara yang terkait dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terorisme internasional. Hal ini membuktikan bahwa terorisme internasional telah menjadi isu yang sangat mengancam stabilitas keamanan baik di regional maupun dalam lingkup global. Efektivitas pemberantasan terorisme lintas negara akan bergantung pada bagaimana kerjasama yang dilaksanakan di lapangan, semakin baik kerjasama yang diterapkan dalam operasi-operasi pemberantasan terorisme lintas negara, maka akan semakin kuat pula stabilitas keamanan yang tercipta di regional Asia Tenggara.

2.4. Kesimpulan

Ancaman asimetris marak terjadi di kawasan Asia Tenggara, berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak stabilitas keamanan di Asia Tenggara seperti terorisme, perompakan dan bajak laut, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal dan kejahatan lintas negara lainnya. Di antara berbagai ancaman asimetris yang disebutkan diatas ancaman terorisme dianggap sebagai ancaman asimetris dan non-konvensional yang paling nyata di hadapi oleh dunia internasional, tidak terkecuali wilayah Asia Tenggara. Dikarenakan aksi terorisme tidak memilih-memilih korban tertentu dan dapat terjadi dimana saja. Disamping itu, ancaman terorisme juga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴⁰Waluyo, *Kontra Terorisme*, 2009, hal 39 & 44.

Dengan semakin maraknya aksi terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, yang mengancam stabilitas kawasan, sepuluh negara anggota dituntut untuk dapat menciptakan rasa aman terhadap ancaman yang datang. Kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah yang paling sering mengalami kejadian terorisme, kondisi ini menciptakan kekhawatiran dan ketegangan terhadap masyarakat di kawasan. Sehingga menuntut dirumuskannya kebijakan yang dapat menangani ancaman asimetris yang berkembang.

Aksi-aksi terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang semakin berkembang dan makin memperluas jaringan terorisme internasional tentunya memberikan dampak terhadap penguatan kerjasama diantara negara-negara tersebut dalam upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama tentang pemberantasan terorisme di Asia Tenggara. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan merupakan kesepakatan antara negara-negara Asia Tenggara dalam melihat ancaman terorisme sebagai ancaman yang paling mengancam kedaulatan negara dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Persepsi negara-negara dalam melihat terorisme sebagai ancaman yang paling nyata tidak terlepas dari tragedi pengeboman WTC yang terjadi di Amerika Serikat dan kebijakan globalnya dalam menghadapi terorisme. Tentunya upaya pemberantasan terorisme tidak sebatas pada kebijakan diatas kertas saja, akan tetapi pelaksanaan dilapangan pun sangat mempengaruhi efektivitas dari penangkalan yang ingin diciptakan di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan konsistensi seluruh anggota Asia Tenggara dalam memberantas aksi-aksi terorisme dengan tetap berkomitmen terhadap kebijakan dan strategi pemberantasan terorisme yang telah disepakati bersama.

Penanganan terhadap aksi kejahatan terorisme melalui pendekatan pertahanan militer adalah bagian dari fungsi pertahanan negara untuk melindungi keselamatan segenap bangsa. Penanganan ancaman terorisme dilaksanakan dengan OMSP melalui pendekatan preventif, koersif, preemptive atau represif, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi yang dihadapi serta berdasarkan keputusan politik. Hal ini disebabkan persepsi bangsa Indonesia yang

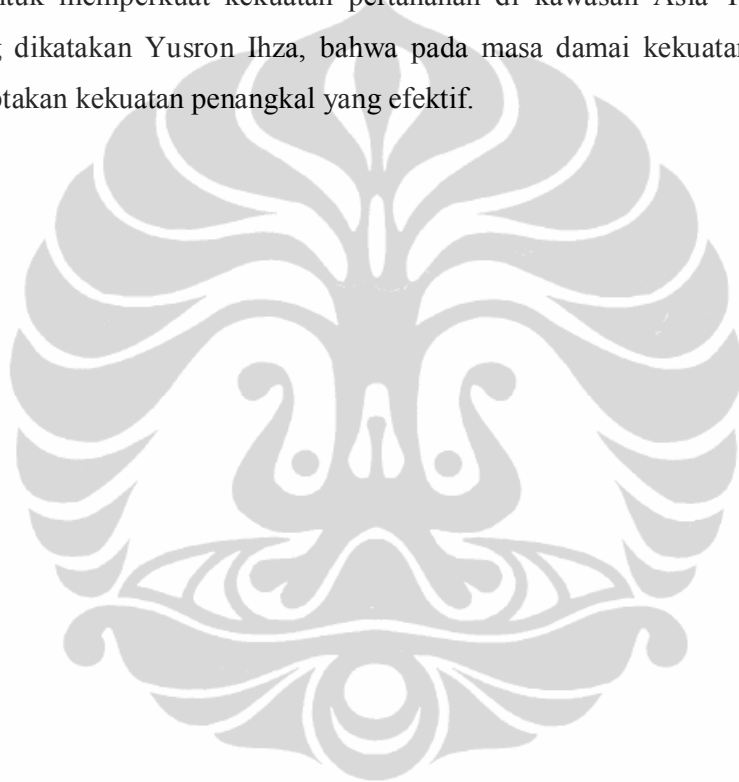
mengkategorikan ancaman terorisme sebagai ancaman nirmiliter yang mana penanganannya harus dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi ini dilakukan tidak dengan sepenuhnya melakukan tindakan militer. Tetapi juga dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait terhadap upaya penyelenggaraan pertahanan yang efektif. Namun, jenis operasi ini belum mampu diejawantahkan secara maksimal dalam bentuk doktrin, strategi dan taktik terlebih yang berhubungan upaya bersama dalam memberantas aksi terorisme internasional.

Tentunya kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas haruslah direalisasikan dengan melakukan tindakan penangkalan dan penindakan terhadap berbagai kelompok terorisme yang ada baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Keberhasilan usaha pemberantasan terorisme akan terlihat dari seberapa kuatkah efek penangkalan yang diciptakan oleh komponen pertahanan negara. Akan tetapi, tindakan penangkalan terhadap terorisme yang semakin marak di kawasan Asia Tenggara diperlukan adanya kerjasama yang terjadi di antara sesama penghuni kawasan Asia Tenggara agar dapat secara bersama-sama merumuskan tindakan dan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam pidato kenegaraan, Agustus 2007, Presiden SBY pun mengingatkan untuk bekerja mencari akar permasalahan terorisme, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, ekstremisme, dan budaya kekerasan.⁴¹

Terorisme merupakan ancaman keamanan non-konvensional yang paling berbahaya karena tidak pernah bisa ditebak kapan aksi terorisme akan dilakukan, di mana lokasinya dan siapa yang menjadi target dari kejahatan tersebut. Sehingga akan muncul kecemasan dan kekhawatiran dari masyarakat Indonesia terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan rasa aman terhadap warganya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia dan juga di kawasan Asia Tenggara untuk dapat secara bersama-sama menyatukan persepsi dan pandangan terhadap ancaman terorisme yang berkembang di kawasan dan mengancam stabilitas keamanan yang telah tercipta. Mengingat bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan lintas negara dimana kelompok-

⁴¹ Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, *Mari Kita Bersatu dalam Melawan Aksi-Aksi Terorisme*, dalam Tabloid Palagan; Media Pemersatu Bangsa, edisi 41, September 2009, h. 7.

kelompok terorisme yang ada di berbagai negara di Asia Tenggara saling berkaitan dan memiliki jaringan dengan kelompok terorisme internasional yang selama ini dikenal dengan Al-Qaeda, yang dipimpin oleh Osama Bin Laden, musuh nomor satu Amerika Serikat pasca terjadinya tragedi peledakan gedung *World Trade Centre* (WTC). Tentunya hal ini dapat dilakukan jika semua entitas di Asia Tenggara dapat secara terbuka memberikan informasi yang didapat melalui aktivitas intelijennya. Selain itu juga, kerjasama harus dilakukan dengan berupaya untuk memperkuat kekuatan pertahanan di kawasan Asia Tenggara, seperti yang dikatakan Yusron Ihza, bahwa pada masa damai kekuatan militer akan menciptakan kekuatan penangkal yang efektif.



BAB III

STRATEGI GELAR PASUKAN INDONESIA

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pertahanan Negara berisi 2 (tiga) hal mendasar yakni tentang apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya serta bagaimana mempertahankannya. Substansi Strategi Pertahanan Negara adalah bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan segala kepentingannya, sehingga Postur Pertahanan Negara merupakan refleksi dari Strategi Pertahanan Negara.¹

Landasan konseptual penyelenggaraan pertahanan adalah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan utuh. Wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia dimana wilayah terususun dari gugusan kepulauan nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah, sarana membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. Ketahanan Nasional merupakan geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari geopolitik Indonesia yakni Wawasan Nusantara dalam mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan regional dan supra regional. Ketahanan Nasional pada hakikatnya berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor alamiah potensi kekuatan nasional yang meliputi demografi, geografi, dan sumber daya alam; serta faktor sosial potensi kekuatan nasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan nasional yang harus dipersiapkan dan dibangun sehingga menghasilkan

¹ Postur Pertahanan Negara 2009 – 2029, h. 5.

suatu kondisi yang dinamis dan kondusif dalam mewujudkan daya tangkal bangsa.²

Tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman pertahanan negara haruslah dipersiapkan secara dini sehingga bangsa dan negara memiliki daya tangkal (*deterrence*) yang efektif. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara

Penyelenggaraan pertahanan tidak terlepas dari bagaimana strategi pertahanan yang diterapkan serta bagaimana doktrin pertahanan yang berfungsi sebagai cara pandang komponen pertahanan dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai respon penyelenggara pertahanan terhadap ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Rizal Sukma menjelaskan bahwa untuk 5 – 10 tahun mendatang tantangan keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia akan berkisar kepada upaya penanggulangan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Menjaga keutuhan wilayah RI
2. Memulihkan stabilitas internal, khususnya penegakan *law and order*
3. Mempercepat pemulihan ekonomi
4. Menyelesaikan dan mencegah konflik-konflik komunal
5. Membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi
6. Menciptakan stabilitas kawasan dan regional
7. Mengelola hubungan setara dan berkeuntungan timbal balik dengan anggota masyarakat internasional lainnya.³

² *Ibid*, h. 4.

³ Rizal Sukma, *Konsep Keamanan Nasional*, CSIS, Jakarta FGD Pro-Patria, 28 2002, h. 3.

Tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan merupakan tantangan yang tidaklah mudah, beberapa tantangan yang disebutkan diatas merupakan konflik laten yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, ditambah lagi dengan bentuk-bentuk ancaman non-konvensional yang semakin marak terjadi di wilayah Indonesia. Tentunya dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia, diperlukan suatu sistem pertahanan yang bersifat komprehensif dimana strategi pertahanan yang dirumuskan dan diterapkan haruslah dapat mencakup ke seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, tidak terkecuali pulau-pulau terluar Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa sistem pertahanan yang diselenggarakan oleh Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta (*total defense*) dimana dalam penyelenggaraannya seluruh rakyat Indonesia menjadi komponen pertahanan negara. Sistem pertahanan ini dianut dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dengan demikian, perlunya dirumuskan kebijakan pertahanan yang dapat melindungi keseluruhan wilayah kedaulatan Indonesia. Pada umumnya kebijakan pertahanan akan selalu memperhatikan tiga hal yaitu perlindungan wilayah/teritorial, kedaulatan dan keselamatan bangsa dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasional.⁴ Menurut Edy Prasetyono dalam upaya untuk memenuhi kepentingan pertahanan nasional perlu untuk memperhatikan, **pertama**, faktor geostrategis negara baik ke dalam dan keluar. Ke dalam, yaitu untuk menciptakan sistem pertahanan nasional yang kredibel didasarkan atas konsep *unified approach* atau *a single all-encompassing strategy* yang meng-cover 17 ribu lebih pulau dengan luas 7.7 juta km² (termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif) dengan panjang pantai sekitar 80 ribu kilometer. **Kedua**, sistem dan strategi pertahanan nasional harus mempertimbangkan perubahan-perubahan dunia internasional, terutama perubahan sifat perang, sifat dan bentuk ancaman dalam dunia yang digerakkan oleh perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi.⁵

⁴ Edy Prasetyono, "Strategi Pertahanan: Dimensi Militer dan Doktrin", Disampaikan pada *Workshop Strategic Defence Review*, Departemen Pertahanan, 16-17 Desember 2002, h. 1.

⁵ *ibid.* h. 1.

Dewasa ini ancaman-ancaman terhadap kedaulatan Indonesia semakin kompleks, tidak hanya yang terjadi di wilayah laut Indonesia tetapi juga merambah ke wilayah darat dan udara Indonesia. Peran militer sebagai pelaksana strategi pertahanan dan keamanan dituntut untuk lebih sigap dan profesional dalam menghadapi setiap kemungkinan ancaman yang muncul. Adapun lima bentuk ancaman keamanan pada wilayah perbatasan darat, laut dan udara Indonesia, yaitu:

1. Klaim teritorial seperti penentuan batas maritim antara Indonesia dan Australia pasca kemerdekaan Timor Timur tahun 2002 terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Manuver militer seperti aksi kapal Angkatan Laut Malaysia yang tidak merespon kontak komunikasi MATRA LAUT Indonesia di sekitar blok Ambalat yang masih dalam status sengketa.
3. Kejahatan lintas batas seperti jalur penyelundupan senjata kecil dan ringan yang disyalir dari Malaysia dan Filipina ke Poso di sekitar utara laut Sulawesi.
4. Pelanggaran atas kedaulatan dan hak berdaulat seperti maraknya illegal fishing oleh kapal China, Filipina dan Thailand dalam wilayah perairan Indonesia di sekitar Laut China Selatan, Laut Arafura dan Laut Sulawesi Utara.
5. Pergerakan manusia lintas batas, baik bersifat tradisional maupun illegal di wilayah perbatasan darat Indonesia – Papua Nugini di wilayah Papua, Indonesia – Malaysia di wilayah Kalimantan, serta Indonesia – Timor Leste wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pencari suaka politik akibat kondisi konflik di negara asal, misalnya pengungsi dari Afghanistan, beberapa kali diketahui memasuki wilayah Indonesia sebagai wilayah transit sebelum menuju Malaysia (Shiskha Prabawaningtyas, 2009).⁶

⁶Shiskha Prabawaningtyas, “Ancaman Keamanan Indonesia”, 2009, h. 14.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang orientasi gelar pasukan Indonesia yang masih melihat potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri atau internal dengan sedikit banyak mengabaikan potensi-potensi ancaman yang berasal dari luar atau eksternal dan berupaya untuk melihat dan menjelaskan tentang pola strategi gelar pasukan Indonesia yang disesuaikan dengan geografis wilayah kedaulatan Indonesia.

3.1 Strategi Gelar Pasukan Indonesia

Sistem pertahanan mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan geografis dan spektrum ancaman yang berkembang, sistem pertahanan semesta mengalami perubahan ke sistem pertahanan berlapis yang terdiri dari zona-zona pertahanan. Zona pertahanan I merupakan zona penyangga, yang berada di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hingga wilayah musuh, gabungan kekuatan matra laut dan matra udara, dan pasukan khusus matra darat sebagai kekuatan pemukul.

Zona Pertahanan II merupakan zona pertahanan utama yang meliputi wilayah antara garis pantai kepulauan Indonesia dan batas Zona Ekonomi Eksklusif, berfungsi sebagai zona penindakan yang merupakan gabungan kekuatan matra laut dan matra udara sebagai kekuatan pemukul utama. matra darat sebagai kekuatan penyangga dan mempertahankan wilayah pantai. Zona Pertahanan III merupakan zona perlawanan yang mencakup keseluruhan wilayah darat Indonesia namun lebih memprioritaskan kepada pulau-pulau besar di Indonesia. Berfungsi sebagai zona penindakan dan perdamaian dimana matra darat sebagai kekuatan pemukul utama.

Strategi gelar pasukan merupakan salah satu upaya dalam mencapai keamanan nasional suatu bangsa, dalam pelaksanaannya gelar pasukan yang dilaksanakan dan dirumuskan haruslah mencakup kepada seluruh wilayah kedaulatan suatu negara, baik wilayah laut, darat maupun udara. Efektivitas strategi gelar pasukan akan sangat bergantung kepada bagaimana reaksi yang timbul dalam merespon suatu ancaman yang berpotensi terjadi atau persepsi

terhadap ancaman baik yang berasal dari internal negara maupun eksternal sebagai konsekuensi dari interaksi antar negara yang terbentuk.

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mempertahankan kedaulatannya ditumpukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (UUD NO. 34 tahun 2004).⁷

Tugas pokok Matra daratlah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (pasal 7 ayat 1 dan 2 UUD nomor 34 tahun 2004).⁸ Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Operasi militer untuk perang;
 1. Operasi Gabungan TNI
 2. Operasi Darat
 3. Operasi Laut
 4. Operasi Udara
 5. Kampanye Militer
 6. Operasi Bantuan
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁸ *Ibid.*

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tabel 1.1. Operasi Militer TNI

Operasi Militer Perang	Operasi Militer Selain Perang
Operasi Gabungan TNI	mengatasi gerakan separatis bersenjata
Operasi Darat	mengatasi pemberontakan bersenjata
Operasi Laut	mengatasi aksi terorisme
Operasi Udara	mengamankan wilayah perbatasan
Kampanye Militer	mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
Operasi Bantuan	melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
	mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
	memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
	membantu tugas pemerintahan di daerah
	membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang

	diatur dalam undang-undang
	membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
	membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
	membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (<i>search and rescue</i>)
	membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Sumber : Undang-Undang Dasar Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁹

Dalam doktrin TNI, Tri Dharma Eka Karma, yang merupakan perubahan dari doktrin awal yaitu Catur Dharma Eka Karma, disebutkan bahwa fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan adalah sebagai berikut :

1. Penangkal, kekuatan TNI harus mampu mewujudkan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan nonmiliter dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

⁹Undang-Undang Dasar Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Penindak, kekuatan TNI harus mampu digerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
3. Pemulih, kekuatan TNI bersama dengan instansi pemerintah membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara akibat kekacauan perang.¹⁰

Kekuatan TNI sebagai alat pertahanan Indonesia terdiri dari 3 matra, yaitu matra laut, darat dan udara. Pembahasan selanjutnya akan melihat bagaimana gelar pasukan TNI secara umum dan melihat kesiapan alutsista TNI serta personel TNI. Tabel 3.1. akan memperlihatkan jumlah pasukan TNI per matra pada tahun 2007, dimana matra darat memiliki jumlah personel terbanyak, disusul matra laut dan matra udara dengan personel paling sedikit.

Tabel 3.2. Kekuatan Personil TNI tahun 2007

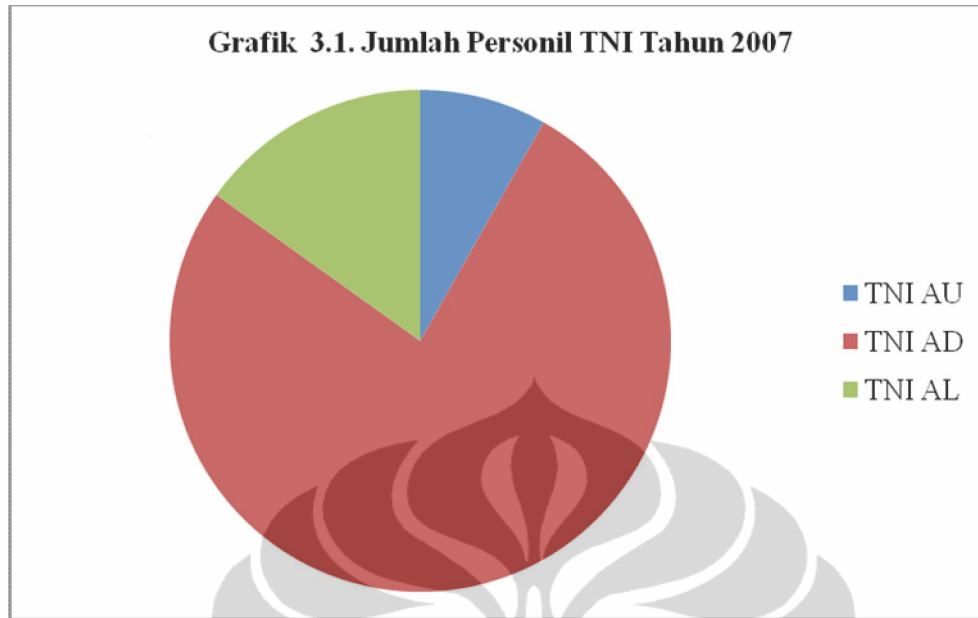
Angkatan	Jumlah
MATRA DARAT	317.273
MATRA LAUT	62.556
MATRA UDARA	33.900
Jumlah	413.729

Sumber postur pertahanan 2009 – 2029.¹¹

Tabel diatas menunjukkan kekuatan *manpower* yang dimiliki oleh kekuatan pertahanan Indonesia pada tahun 2007, jika dikaitkan dengan wilayah geografis Indonesia, maka jumlah terbut masihlah sedikit untuk dapat digelar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya masih diperlukannya penambahan jumlah pasukan sehingga gelar pasukan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi geografis wilayah.

¹⁰ Perubahan Doktrin Tni Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor : Kep/21/I/2007 tanggal 12 Januari 2007

¹¹ Postur Pertahanan 2009 – 2029, h. 24.



Sumber Rapat Komisi I dengan Departemen Pertahanan/Mabes TNI (2007).¹²

Jumlah *manpower* Indonesia pada tahun 2007 sebesar 413.729 dimana matra darat dengan jumlah personil terbanyak sebesar 317.273, berselisih jauh dengan Angkatan Laut sebesar 62.556 dan Angkatan Udara dengan jumlah 33.900. data tersebut mengindikasikan bahwa Tentara Nasional Indonesia hingga tahun 2007 lebih menitikberatkan penguatan kekuatannya pada matra darat dibandingkan matra laut dan udara. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki luas yang sebagian besar adalah wilayah laut. Seharusnya matra laut dan udara menjadi perhatian untuk penguatan jumlah personil sehingga gelar pasukan akan dapat sesuai dengan geografis wilayah Indonesia.

Gelar pasukan TNI terbagi atas 3 Matra : Pertama, matra darat yang terbagi atas 3 kekuatan, kekuatan terpusat yaitu KOSTRAD (Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat), KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus), kekuatan kewilayahan yaitu KODAM (Komando Daerah Militer), dan kekuatan pendukung yaitu KOREM (Komando Resort Militer) dan KODIM (Komando

¹²Rapat Komisi I dengan Departemen Pertahanan/Mabes TNI (2007).

Distrik Militer). Kedua, matra udara yang terbagi atas SKADRON UDARA dan KOSEK/SATRAD. Ketiga, matra laut yang terbagi atas kekuatan armada Barat dan Timur, serta Pangkalan Utama Matra Laut. Tabel 3.2 menunjukkan gelar pasukan TNI pada tahun 2007 beserta tempat penyebaran pasukan yang masih menggunakan gelar pasukan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3. Gelar Pasukan Militer Indonesia Tahun 2007

SATUAN	DIVISI	JUMLAH	GELAR PASUKAN
AD	KOSTRAD	2	Masing-masing di gelar di pulau Jawa dan Sulawesi
	KOPASSUS	1	Digelar di pulau Jawa
	KODAM	12	Masing-masing digelar di : <ul style="list-style-type: none"> • Kodam Iskandar Muda, Nangroe Aceh Darussalam dan didukung oleh 7 Korem • Kodam I/Bukit Barisan di Sumatera Utara dan didukung oleh 5 Korem • Kodam II/Sriwijaya di Palembang dan didukung oleh 4 Korem • Kodam Jaya dan didukung oleh 2 Korem • Kodam III/Siliwangi dan didukung oleh 4 Korem • Kodam IV/Diponegoro dan didukung oleh 4 Korem • Kodam V/Brawijaya dan didukung oleh 4 Korem • Kodam VI/Tanjungpura

			<p>dan didukung oleh 4 Korem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kodam VII/Wirabuana dan didukung oleh 5 Korem • Kodam IX/Udayana dan didukung oleh 3 Korem • Kodam XVI/Pattimura dan didukung oleh 2 Korem • Kodam XVII/Trikora dan didukung oleh 4 Korem
AU	SKADRON	7	<p>Masing-masing di gelar di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Sumatera • 4 Jawa • 1 Sulawesi
	KOSEK/SATRAD	4	<p>Masing-masing di gelar di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Makassar • Medan • Biak
AL	ARMADA TIMUR	1	Digelar di Teluk Ratai Jakarta
	ARMADA BARAT	1	Digelar di Surabaya
	PANGKALAN UTAMA MATRA LAUT	11	<p>Masing-masing digelar di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belawan • Padang • Tanjung Pinang • Jakarta • Surabaya

			<ul style="list-style-type: none">• Makassar• Kupang• Bitung• Ambon• Jayapura• Merauke
--	--	--	---

Sumber Postur Pertahanan 2009-2029.¹³

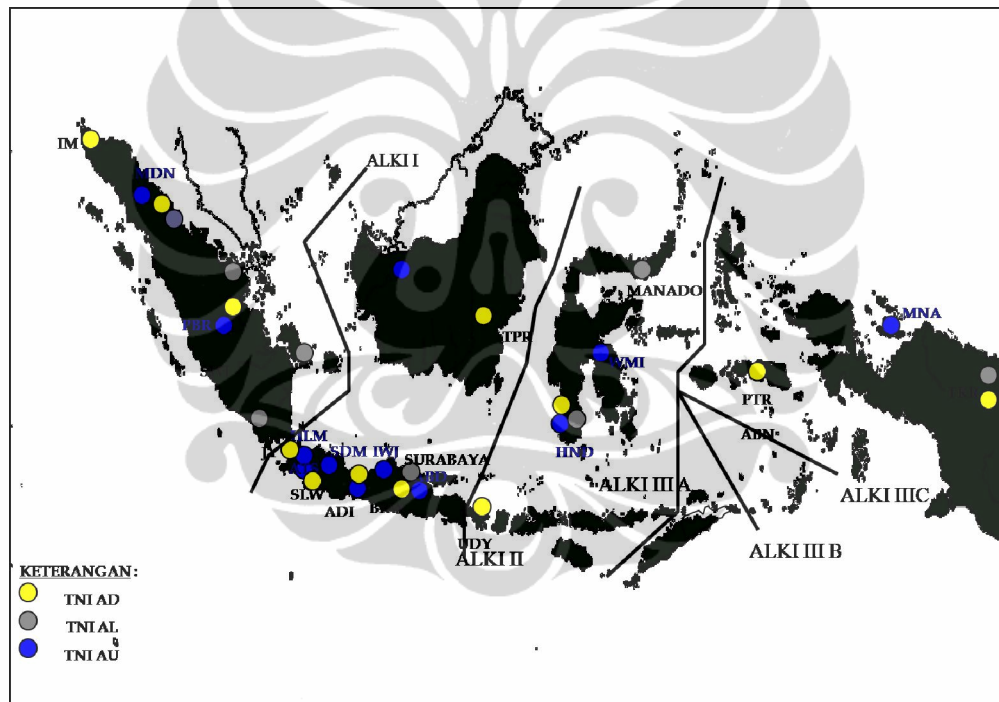
Dari data gelar pasukan TNI pada tahun 2007, dapat dilihat bahwa strategi gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia tidak mengalami perubahan atau pun stagnan. Daerah-daerah yang menjadi tempat pegelaran pasukan masih sama. Hal ini menunjukkan bahwa warisan orde baru dimana persepsi ancaman masih ditujukan ke dalam negeri serta penggunaan kekuatan militer yang ditujukan untuk stabilitas dalam negeri masih sangat tinggi, sementara ancaman yang datang dari eksternal masih belum mendapat perhatian yang lebih. Walaupun, pada masa sekarang ini ancaman-ancaman yang datang dari luar marak terjadi seperti terorisme, pembajakan di laut, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Tentunya stagnannya pola gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia memberikan dampak yang signifikan pula terhadap keamanan nasional bangsa Indonesia. gelar pasukan tidak menunjukkan bahwa penyebaran atau gelar pasukan di tiap matra mampu menyesuaikan dengan ancaman eksternal dan keadaan geografis Indonesia yang lebih dikenal sebagai negara kepulauan.

Secara geografis, wilayah kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terdiri dari 17.508 pulau, menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) seluas 4 juta km². Keadaan geografis ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jalur perlintasan mengingat fungsi laut sebagai jalur transportasi. Aktivitas perairan di laut yang cukup penting bagi masyarakat internasional membuat keamanan laut di Indonesia menjadi faktor vital dalam

¹³ Postur Pertahanan 2009-2029, h. 30-33.

keamanan mengingat wilayah perairan Indonesia digunakan sebagai jalur lalu lintas laut internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI). Hal tersebut masih ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki 4 dari 9 choke points di dunia yang sangat vital sebagai jalur transportasi laut untuk perdagangan dan jalur minyak, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Ombai Wetar. Karena itu, secara geopolitik, kondisi nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Berikut peta penjelasan yang menggambarkan wilayah Indonesia yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia serta pola penyebaran gelar pasukan TNI, (gambar 3.1).

Grafik 3.2. Gelar Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)



Sumber Andi Widjajanto, Strategi Pertahanan Indonesia, 2006.¹⁴

Pada ketiga matra TNI, gelar pasukan masih dikonsentrasikan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa gelar pasukan

¹⁴ Andi Widjajanto, "Gelar Pertahanan Indonesia", diunduh melalui [http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia\[powerpoint\]-AndiWidjajanto.pdf](http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia[powerpoint]-AndiWidjajanto.pdf), diakses tanggal 22 Juni 2011.

Indonesia tidak diorientasikan pada wilayah-wilayah bagain luar dan zona ekonomi eksklusif dan wilayah-wilayah perbatasan. Situasi ini juga dipersulit dengan kondisi jumlah divisi yang terlalu sedikit jika dikaitkan dengan geografis Indonesia dan tidak adanya keterpaduan antar matra dalam melakukan operasi militer, bahkan gelar pasukan lebih ditujukan untuk penguatan matra darat jika dilihat dari jumlah personel yang dimiliki. Situasi ini mengindikasikan bahwa ancaman eksternal maupun perubahan lingkungan strategisnya belum menjadi salah satu faktor utama dalam pola penyebaran pasukan Indonesia.

Secara normatif, gelar pasukan seharusnya ditempatkan pada wilayah-wilayah yang penting atau hot spot area dan didukung dengan kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan strategis dan kondisi geografisnya sehingga menciptakan efek penangkalan terhadap ancaman. Realitanya, strategi gelar pasukan belum mampu untuk secara signifikan mempengaruhi orientasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan persaingan eksternal.

Kondisi geografis Indonesia yang unik dan sangat vital menuntut adanya pergelaran pasukan yang mampu untuk mempertahankan wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, strategi pertahanan yang dikembangkan baik jumlah alutsista, jumlah prajurit serta penyebarannya harus disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Signifikansi strategi gelar pasukan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan apakah sebuah negara siap dalam menghadapi ancaman dari negara lain.¹⁵ Hal tersebut mempengaruhi kesiapan suplai, komando, komunikasi, dan sistem transportasi yang menentukan pergerakan strategi pasukan.¹⁶ Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang luas, yang wilayahnya lebih banyak terdiri dari lautan, sehingga dibutuhkan kekuatan pertahanan yang memiliki mobilitas yang tinggi yang dengan secara cepat dapat melindungi keseluruhan wilayah Indonesia. Hal ini tentunya dapat terwujud dengan pergelaran pasukan yang menyeluruh, serta didukung dengan

¹⁵ Stephen Biddle, *Rebuilding the Foundation of Ofense-DefenseTheory*, The Journal of Politics, Vol 63, No. 3, Agustus 2001, h. 743.

¹⁶ *Ibid*, h. 752.

alutsista yang relevan dan strategi pertahanan yang efektif sebagai penangkal terhadap berbagai ancaman yang masuk.

Dilihat dari alutsista, pada tahun 2007, kondisi alutsista mengalami masa kritis dimana jumlah alutsista mengalami banyak kekurangan yang diakibatkan dari habisnya masa pakai untuk alutsista tertentu dan banyaknya kecelakaan dan kerusakan alutsista TNI. Tabel 3.3 akan memperlihatkan jumlah alutsista TNI per matra dimana kesemua matra mengalami masa kritis alutsista yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Tabel 3.4. Kondisi Kritis Alutsista Pada Tahun 2007

KATEGORI	Jenis Alutsista	Jumlah	Keterangan
MATRA DARAT	1. Rudal Rapiro	50	- Thn 1965-1980
	2. RBS	13	- Thn 1980
	2. Ranpur	(1.296)	Baik : 861
	- Tank	756	Rusak : 435
	- Panser	540	- Thn 1950-1992
	3. Meriam (Armed)	476	Baik : 204 Rusak : 272
MATRA LAUT	1. KRI	- PK: 16, PKR: 12, AT : 28 KAL: 312	- Usia diatas 25 Thn
	2. Pesud	- Fixwing: 47	- Usia diatas 25 Thn
	3. Marinir	- Rotary Wing 16 Ranpur 306, Meriam 83, Roket : 50	- Mendekati usia 40 Thn

MATRA UDARA	F-5 E-F	1 Skadron	2010
	Hawk MK-53	1 Skadron	2011
	OV-10 Bronco	1 Skadron	2007
	C-130 B	2 Skadron	(Retrofit/upgrade)
	F-2	1 Skadron	2008
	C-212 Cassa	1 Skadron	2015
	Heli (Solov dan S-58T)	2 Skadron	2008 (Solov) 2009 (S-58T)
	Latih (AS202Bravo & T-34C)	2 Skadron	2020
	Pswt Angkut & Heli VVIP		

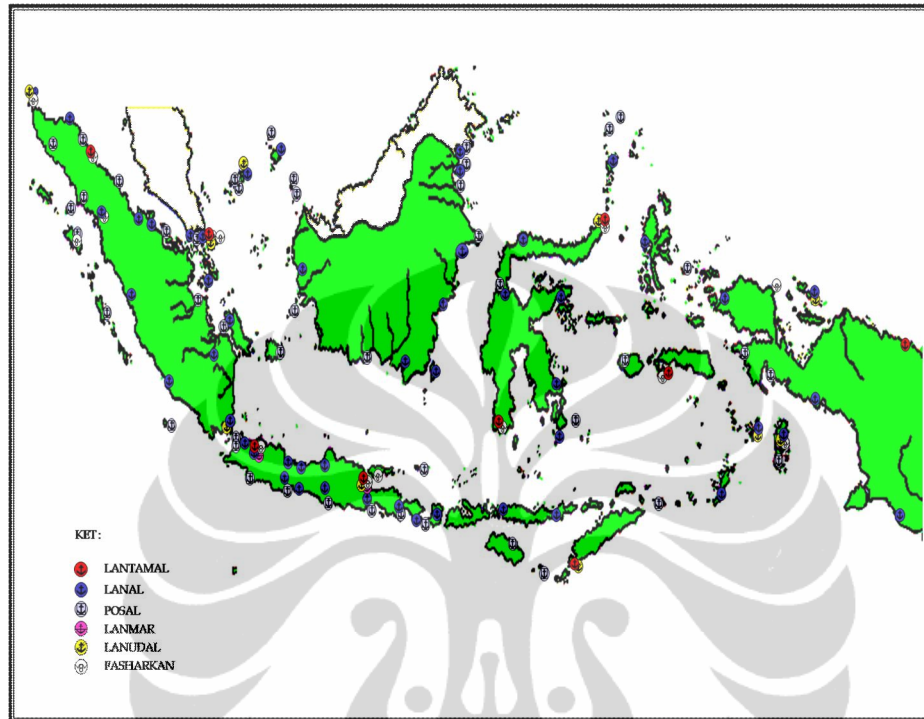
Sumber postur pertahanan 2009 – 2029.¹⁷

Hal ini tentu sangat memprihatinkan dimana alutsista yang dimiliki tidak mampu untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan secara keseluruhan. Kemampuan suatu negara dalam menyelenggarakan operasi militer baik dalam masa perang maupun masa damai akan sangat bergantung kepada kesiapan alutsista. Hal ini akan berimplikasi terhadap kemampuan pertahanan Indonesia dalam melakukan tindakan penangkalan terhadap setiap ancaman baik militer maupun non-militer serta kemampuan penindakan untuk menghancurkan setiap kekuatan musuh. Oleh karena itu diperlukan pengembangan kekuatan alutsista sehingga dapat mendukung penyebaran pasukan dan mobilitas pasukan dalam menghadapi ancaman yang dapat datang kapan saja.

¹⁷ Postur Pertahanan 2009 – 2029, h. 34.

3.2 Gelar Pasukan TNI Angkatan Laut

Grafik 3.3. Gelar Pasukan Matra Laut



Sumber Andi Widjajanto, Strategi Pertahanan Indonesia, 2006.¹⁸

Grafik diatas memperlihatkan bagaimana strategi gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih belum mencakup keseluruhan wilayah Indonesia, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi segala komponen pertahanan Indonesia untuk dapat menciptakan pertahanan yang komprehensif. Ketidak-komprehensifnya gelar pasukan TNI Angkatan Laut ditunjukkan dengan masih banyaknya wilayah laut Indonesia yang belum tercakup dalam strategi gelar pasukan matra laut, terlebih terhadap pulau-pulau terluar Indonesia.

Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol yang mendapat perhatian di abad 21. Fungsi wilayah maritim yang makin strategis dalam kepentingan negara-negara di dunia mendorong upaya

¹⁸ Andi Widjajanto, "Gelar Pertahanan Indonesia", diunduh melalui [http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia\[powerpoint\]-AndiWidjajanto.pdf](http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia[powerpoint]-AndiWidjajanto.pdf), diakses tanggal 22 Juni 2011.

untuk meningkatkan pengamanannya. Meningkatnya kegiatan perdagangan dan transportasi internasional di perairan Indonesia yang melalui wilayah perbatasan maupun melalui *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Transportation* (SLOT), mengakibatkan laut memiliki peranan yang sangat penting baik bagi Indonesia maupun bagi dunia internasional karena laut merupakan penghubung pulau-pulau di Indonesia.

Di Kawasan Asia Tenggara, wilayah Selat Malaka menjadi fokus masyarakat internasional, karena lalu lintas transportasi perdagangan dunia, paling padat melalui Selat Malaka. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara besar untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago*), keinginan negara besar tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa-masa mendatang.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik, di satu sisi mempunyai posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengamankannya. Ditambah lagi dengan warisan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Hukum Laut tahun 1982 yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan beberapa *choke points* yang strategis bagi kepentingan global seperti di selat Sunda, selat Lombok dan Selat Makassar. Kesemuanya itu merupakan wilayah yang sangat rawan terjadinya ancaman keamanan maritim, tidak hanya itu, selain ketiga selat diatas, Indonesia juga dituntut untuk mampu melakukan pengamanan yang maksimal terhadap selat Malaka bekerjasama dengan 2 negara lain yaitu Singapura dan Malaysia.

Angkatan Laut bertugas (UUD TNI 1945 pasal 9) :

1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

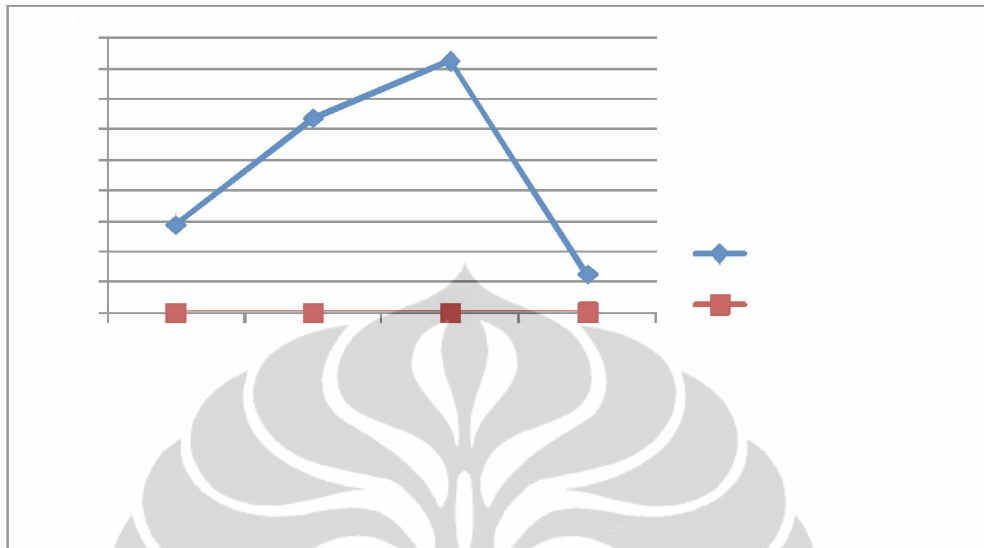
Tabel 3.5. Alutsista Matra Laut dan Tingkat Kesiapannya

Jenis alutsista	Jumlah	Tingkat kesiapan alutsista
Kapal perang (KRI)	144 unit	16,67%
Kapal Angkatan laut (KAL)	318 unit	52,44%
Kendaraan tempur marinir berbagai jenis	412 unit	41,02%
Pesawat terbang	62 unit	31%

Sumber diolah dari lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).¹⁹

¹⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).

Grafik 3.4. Jumlah Alutsista Matra Laut dan Tingkat Kesiapannya



Sumber diolah dari lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014)²⁰

3.3 Gelar Pasukan TNI Angkatan Darat

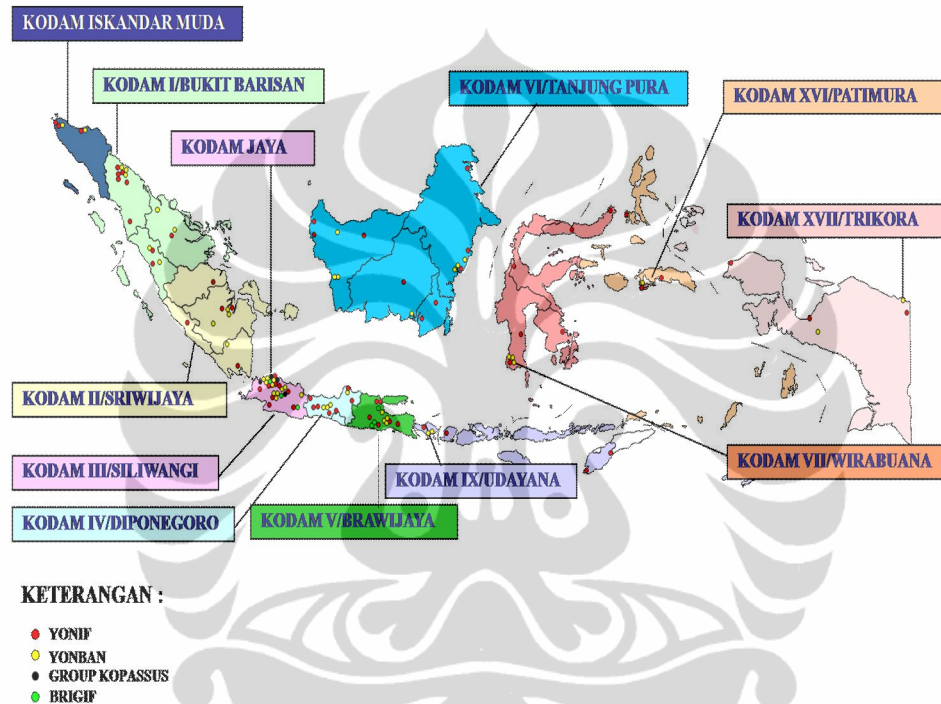
Seperti halnya dengan gelar pasukan matra laut, gelar pasukan matra darat pun belum mampu secara komprehensif dilaksanakan di seluruh wilayah darat kedaulatan Indonesia, masih terdapat wilayah-wilayah, khususnya pulau-pulau terluar yang belum tercakup dalam strategi Angkatan Darat (matra darat) Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa penyebaran gelar pasukan matra darat belum sama sekali menuju pada penyebaran pasukan yang berorientasi pada ancaman-ancaman yang ada. Hal tersebut masih diperparah dengan kondisi gelar pasukan yang belum merefleksi kondisi geografis Indonesia dan ancaman-ancaman yang berasal dari luar sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pola penyebaran gelar pasukannya.

Strategi gelar pasukan matra darat lebih banyak difokuskan kepada wilayah dalam geografis Indonesia, sementara untuk wilayah-wilayah terluar

²⁰ *Ibid.*

belum mendapatkan perhatian. Hal ini mencerminkan bahwa strategi gelar pasukan masih diorientasikan kepada penciptaan stabilitas dalam negeri dan lebih melihat ancaman internal sebagai ancaman yang paling mungkin terjadi dan mengancam kedaulatan Indonesia.

Grafik 3.5 Gelar Pasukan Matra Darat



Sumber Andi Widjajanto, Strategi Pertahanan Indonesia, 2006.²¹

Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh Angkatan Darat bertugas (UUD TNI 1945 pasal 8) adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
2. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;

²¹ Andi Widjajanto, "Gelar Pertahanan Indonesia", diunduh melalui [http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia\[powerpoint\]-AndiWidjajanto.pdf](http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia[powerpoint]-AndiWidjajanto.pdf), diakses tanggal 22 Juni 2011.

3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

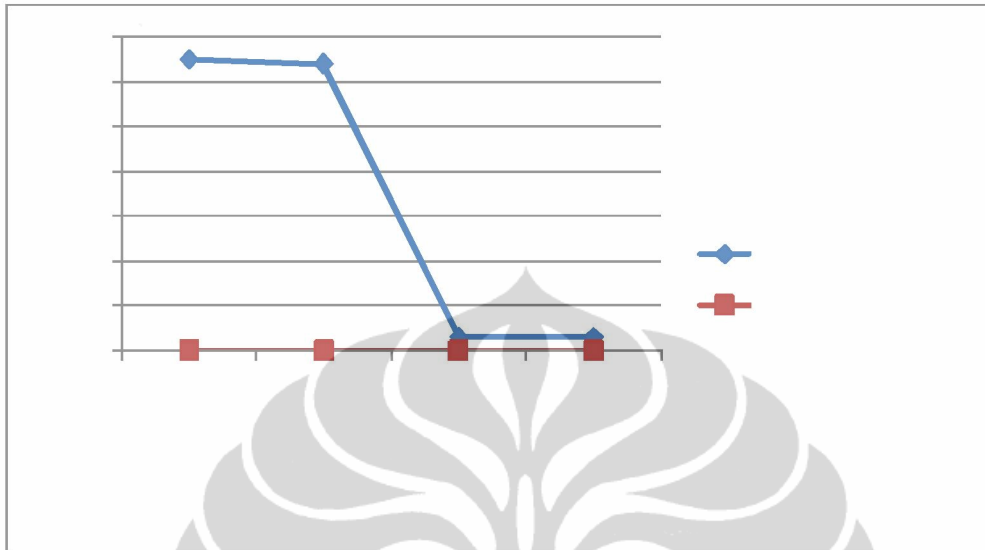
Tabel 3.6. Alutsista Matra Darat dan Tingkat Kesiapannya

Jenis alutsista	Jumlah	Tingkat kesiapan alutsista
Kendaraan tempur berbagai jenis	1.299 unit	63,74%
Senjata infanteri berbagai jenis	1.281 unit	77,75%
Kendaraan bermotor berbagai jenis	59.842 unit	87,17%
Pesawat terbang berbagai jenis	62 unit	59,68%

Sumber diolah dari lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).²²

²² Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).

Grafik 3.6. Jumlah Alutsista Matra Darat dan Tingkat Kesiapannya



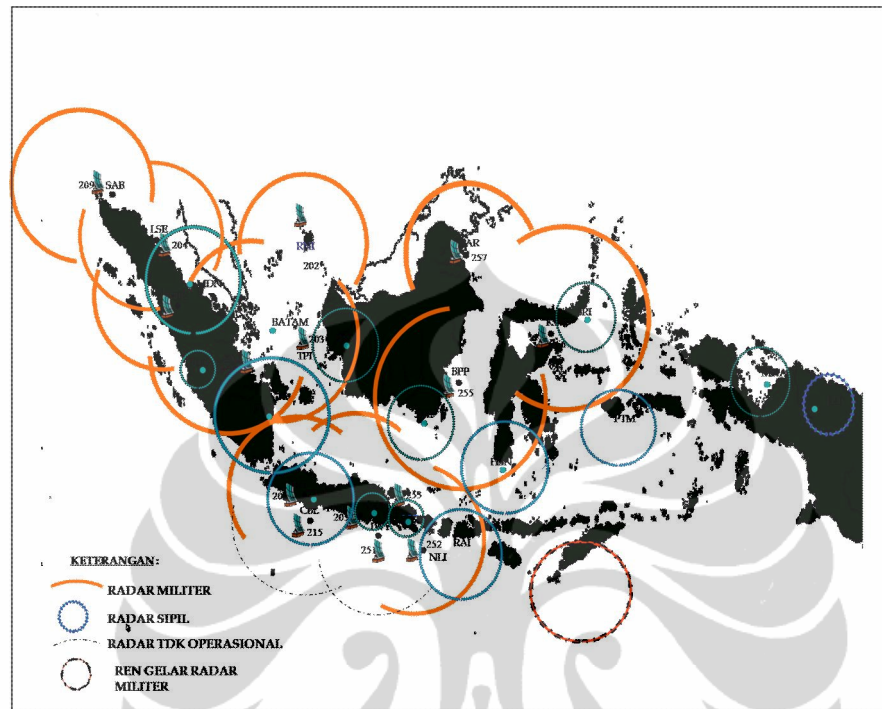
Sumber diolah dari lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).²³

3.4 Gelar Pasukan TNI Angkatan Udara

Gelar pasukan TNI Angkatan Udara belum mencakup pada seluruh ruang udara Indonesia, padahal TNI Angkatan Udara merupakan komponen utama pertahanan Indonesia. Dapat dilihat bahwa, sebagian besar wilayah Indonesia Barat telah tercakup dalam gelar Radar TNI Angkatan Udara. Namun, untuk wilayah Indonesia bagian timur, belum sepenuhnya tercakup dalam gelar radar Angkatan Udara. Hal ini menunjukkan bahwa belum mampunya Angkatan Udara dalam menggelar kekuatan pertahanan yang komprehensif.

²³ *Ibid.*

Grafik 3.7. Gelar Radar Matra Udara



Sumber Andi Widjajanto, Strategi Pertahanan Indonesia, 2006.²⁴

Untuk matra udara pola strategi gelar pasukan udara yang difungsikan dalam melakukan tugas *surveillance* belumlah mampu memenuhi kemampuan yang disesuaikan dengan keadaan geografis Indonesia dan ancaman eksternal. Bagi negara yang memiliki wilayah kepulauan yang sangat luas, kekuatan matra udara menjadi sangat penting dikarenakan matra ini mampu untuk memberikan pandangan tentang perang dan perencanaannya, pengorganisasian (*organizing*), penyusunan (*structuring*) dan komando (*commanding*) kekuatan militer.

Bagi Indonesia, keamanan wilayah dirgantara mempunyai nilai vital dalam strategi pertahanan negara. Posisi geografi Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara, serta berada pada salah satu wilayah pelintasan transportasi dunia, membawa implikasi terhadap potensi pelanggaran wilayah udara yang

²⁴ Andi Widjajanto, "Gelar Pertahanan Indonesia", diunduh melalui [http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia\[powerpoint\]-AndiWidjajanto.pdf](http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia[powerpoint]-AndiWidjajanto.pdf), diakses tanggal 22 Juni 2011.

cukup tinggi. Pelanggaran wilayah udara oleh suatu negara merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara sehingga menjadi ranah fungsi pertahanan negara.²⁵

Angkatan Udara bertugas (UUD TNI 1945 pasal 10):

1. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Dalam melaksanakan tugasnya, matra udara seharusnya didukung dengan alutsista yang memadai, baik dalam pelaksanaan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Pada kenyataannya jumlah alutsista matra udara belumlah cukup untuk keseluruhan wilayah Indonesia yang luas dan menyebar. Tabel 3.3 akan menunjukkan jumlah alutsista TNI dan tingkat kesiapannya yang belumlah memadai untuk geografis wilayah Indonesia serta untuk pelaksanaan fungsi *surveillance* matra udara.

Tabel 3.7. Alutsista Matra Udara dan Tingkat Kesiapannya

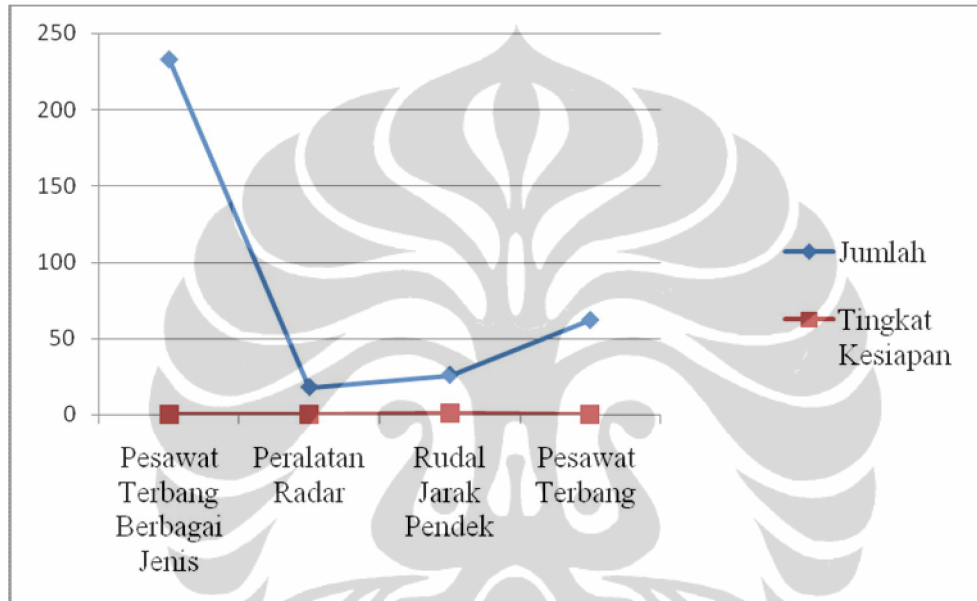
Jenis alutsista	Jumlah	Tingkat kesiapan alutsista
Pesawat terbang berbagai jenis	233 unit	55,79%
Peralatan radar	18 unit	77,78%
Rudal jarak pendek	26 set	100%

²⁵ Postur Pertahanan 2009 – 2029, h. 10.

Pesawat terbang	62 unit	31%
------------------------	---------	-----

Sumber diolah dari lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).²⁶

Grafik 3.8. Jumlah Alutsista Matra Udara dan Tingkat Kesiapannya



Sumber diolah dari lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).²⁷

3.5 Kesimpulan

Gelar strategi pasukan Indonesia belum banyak mengalami perubahan, matra darat masih menjadi tumpuan dalam upaya pelaksanaan strategi pertahanan. Hal ini berbanding terbalik dengan geografis wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Seharusnya, strategi pertahanan Indonesia lebih menitikberatkan pada kekuatan matra laut dan darat sebagai kekuatan utama dan

²⁶ lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2010 – 2014).

²⁷ *Ibid.*

matra udara sebagai kekuatan pendukung. Namun pada kenyataannya penguatan kekuatan pertahanan lebih ditujukan pada matra darat, sementara matra udara dan laut belum mengalami pengembangan yang signifikan.

Perubahan lingkungan eksternal seharusnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi strategi gelar pasukan Indonesia, mengingat bahwa semakin kompleksnya ancaman yang muncul dewasa ini. Akan tetapi pada kenyataannya, strategi gelar pasukan Indonesia belum merefleksikan hal tersebut ke dalam strategi pertahanannya. Hal ini dapat dilihat pada pola penyebaran pasukan baik matra darat, matra laut dan udara yang tidak mengalami perubahan.

Situasi ini akan mempengaruhi kekuatan penangkalan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan persaingan eksternal sehingga mencerminkan strategi gelar pasukan yang belum menyesuaikan dengan geografis wilayah dan kompleksitas ancaman yang semakin marak terjadi. Gelar strategi yang komprehensif dan didukung dengan alutsista yang memadai dan efektif akan memberikan daya tangkal yang efektif bagi suatu negara dan menjadi ancaman balik bagi pelaku-pelaku ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, perlunya untuk mengevaluasi kembali strategi gelar pasukan yang mana mampu untuk dilakukan penyebaran pasukan keseluruhan wilayah Indonesia terutama di wilayah terluar hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif.

Dalam upaya untuk melakukan penangkalan terhadap ancaman terorisme, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan yang sesuai dengan teori yang dirumuskan oleh Ivan Arreguin-Toft, yaitu antara melakukan *direct attack* atau *barbarism*, dimana kedua pilihan tersebut diambil dengan pertimbangan posisi Indonesia sebagai aktor yang lebih kuat di dalam suatu perang asimetris.

BAB IV

GELAR PASUKAN TNI DALAM MENGHADAPI

ANCAMAN ASIMETRIS

Strategi gelar pasukan merupakan salah satu upaya dalam mencapai keamanan nasional suatu bangsa, dalam pelaksanaannya gelar pasukan yang dilaksanakan dan dirumuskan hendaknya mampu untuk melindungi seluruh wilayah kedaulatan suatu negara, baik wilayah laut, darat maupun udara. Efektivitas strategi gelar pasukan akan sangat bergantung kepada bagaimana reaksi yang timbul dalam merespon suatu ancaman yang berpotensi terjadi atau persepsi terhadap ancaman baik yang berasal dari internal negara maupun eksternal sebagai konsekuensi dari interaksi antar negara yang terbentuk.

Dalam bab ini, akan menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dimana terjadinya kesenjangan antara potensi ancaman eksternal dan strategi gelar pasukan Indonesia yang tidak sejalan. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan dugaan sementara penulis dalam penelitian ini.

4.1. Ancaman Asimetris di Asia Tenggara dan Gelar Pasukan TNI

Semakin maraknya ancaman asimetris yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dewasa ini, semakin mengancam stabilitas keamanan di kawasan. Hal ini merupakan bahaya terhadap perdamaian yang telah tercipta diantara negara-negara di Asia Tenggara. Dalam perkembangan dunia internasional sekarang ini, terjadi pergeseran dinamika ancaman yang terjadi pasca tragedi WTC, dunia tidak lagi diperhadapkan pada perang yang sifatnya konvensional. Akan tetapi dunia dewasa ini di hadapkan pada perang yang sifatnya non-konvensional dan transnasional. Disamping gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan yang bersifat konvensional (*ordinary crimes*) dan yang menyangkut kekayaan negara,

seperti keuangan negara (korupsi), kekayaan hasil laut (*illegal fishing*) dan hasil hutan (*illegal logging*), kita harus menghadapi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Dengan semakin maraknya kejahatan lintas negara yang terjadi dewasa ini, maka *awareness* pemerintah terhadap jenis ancaman ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya tangkal yang efektif sehingga ancaman-ancaman tersebut dapat ditindak dan diberantas sebelum dapat masuk ke dalam negara Indonesia.

Serangan WTC dan Bom Bali telah menjadi bukti bahwa upaya negara-negara dalam memerangi terorisme belum berhasil sepenuhnya dan melihat perkembangan ini nampaknya dunia masih dibayangi oleh ancaman terorisme internasional yang juga bermain di lingkup kawasan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2003). Maraknya ancaman asimetris yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan bukti ketidaksiapan komponen pertahanan Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan sebagai bukti bahwa persepsi ancaman lebih banyak ditujukan dalam melihat ancaman yang bersifat internal. Sementara, ancaman-ancaman yang bersifat eksternal belum banyak mendapat perhatian. Strategi gelar pasukan Indonesia pun belum mampu untuk secara komprehensif di tempatkan di wilayah-wilayah terluar Indonesia hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif, sehingga mampu untuk mencegah masuknya ancaman tersebut ke ranah daratan wilayah kedaulatan Indonesia.

Gelar pasukan Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, lebih banyak ditempatkan di wilayah-wilayah yang tidak secara langsung menyentuh wilayah terluar Indonesia. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan tentara Indonesia dalam menggelar kekuatan pada wilayah tersebut ditambah lagi dengan gelar pasukan belum mengalami perubahan dimana gelar pasukan Indonesia masih digelar pada wilayah-wilayah yang sama. Gelar pasukan Indonesia tidak sejalan dengan eskalasi potensi ancaman dan konflik yang berkembang dan marak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini akan sangat berbahaya terhadap upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, mengingat

bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang berada di wilayah terluar.

4.1.1. Ketidakpekaan Penempatan Gelar Pasukan terhadap Eksistensi Terorisme

Terorisme menjadi salah satu ancaman asimetris yang berkembang di wilayah Asia Tenggara, terorisme dianggap sebagai ancaman yang paling nyata terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam pelaksanaan aksinya kelompok terorisme lebih melaksanakan strategi gerilya dalam menjalankan aksinya, pilihan ini menjadi lebih tepat pada saat terjadinya perang asimetris dimana kelompok-kelompok terorisme merupakan pihak yang lebih inferior di dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Terorisme merupakan ancaman yang paling berbahaya karena dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cepat, semakin berkembangnya kelompok terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman tersendiri bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan wilayah yang paling luas di kawasan tentunya dituntut untuk dapat memberikan motivasi bagi negara-negara lain dalam berupaya untuk memberantas tindakan terorisme internasional. Namun, gelar pasukan Indonesia yang digunakan tidaklah sejalan dengan bentuk ancaman dan perkembangan ancaman yang terjadi di kawasan ini. Gelar pasukan Indonesia lebih banyak ditempatkan di wilayah-wilayah yang merupakan wilayah dalam dari negara Indonesia. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan tujuan bersama dalam menciptakan stabilitas keamanan kawasan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ciri-ciri dasar dari terorisme adalah pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis (kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan / kekejaman / penganiayaan fisik); penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik; adanya unsur pendadakan/kejutan; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari

sasaran/korban langsungnya; sasaran pada umumnya nonkombatan; direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.

Ancaman terorisme tersebut sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis ancaman ini seharusnya disikapi dengan melakukan gelar pasukan yang mampu menghadapi ancaman tersebut. Pada kenyataannya Dari data gelar pasukan TNI pada tahun 2007, dapat dilihat bahwa strategi gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia tidak mengalami perubahan atau pun stagnan. Daerah-daerah yang menjadi tempat pergelaran pasukan masih sama. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi ancaman masih ditujukan ke dalam negeri serta penggunaan kekuatan militer yang ditujukan untuk stabilitas dalam negeri masih sangat tinggi, sementara ancaman yang datang dari eksternal masih belum mendapat perhatian yang lebih. Walaupun, pada masa sekarang ini ancaman-ancaman yang datang dari luar marak terjadi seperti terorisme, pembajakan di laut, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Tentunya stagnannya pola gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia memberikan dampak yang signifikan pula terhadap keamanan nasional bangsa Indonesia. gelar pasukan tidak menunjukkan bahwa penyebaran atau gelar pasukan di tiap matra mampu menyesuaikan dengan ancaman eksternal dan keadaan geografis Indonesia yang lebih dikenal sebagai negara kepulauan.

Bahaya terorisme terlihat pada esensi tujuan politik dari suatu kelompok. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan politik dari kelompok-kelompok terorisme ini diantaranya adalah :

1. Memperoleh konsensi-konsensi tertentu, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan politik, penyebarluasan pesan, dan sebagainya,
2. Memperoleh publisitas luas,
3. Menimbulkan kekacauan luas, demoralisasi dan disfungsi sistem sosial,
4. Memancing retalisasi dan atau kontrateror dari pemerintah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan situasi yang akan menguntungkan para

teroris yang akhirnya bahkan mungkin dapat menggulingkan pemerintah

5. Memaksakan kepatuhan dan ketaatan
6. Menghukum yang bersalah, atau dipandang sebagai simbol sesuatu yang jahat/salah, seperti orang-orang yang tidak setuju dengan tujuan perjuangan mereka, bekerja sama dengan penguasa, bergaya hidup yang bertentangan dengan paham mereka dan sebagainya

Jenis ancaman seperti ini secara perlahan namun pasti akan menimbulkan kekacauan stabilitas politik sehingga akan berdampak pada keamanan negara. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara yang dapat berimplikasi pada keraguan negara dalam memberikan rasa aman. Potensi tersebut setidaknya telah terlihat pada gelar pasukan yang justru tidak sesuai dengan ancaman terorisme. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para perumus kebijakan dalam upaya untuk menciptakan gelar pasukan yang sesuai dengan karakteristik ancaman yang muncul dan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Strategi gelar pasukan yang dilakukan haruslah dapat mencegah masuknya ancaman terorisme dan memberantasnya sebelum dapat masuk dan mengancam keamanan warga negara Indonesia.

Potensi tersebut setidaknya telah terlihat pada ketiga matra TNI, dimana gelar pasukan masih dikonsentrasikan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa gelar pasukan Indonesia tidak diorientasikan pada wilayah-wilayah bagain luar dan zona ekonomi eksklusif dan wilayah-wilayah perbatasan. Situasi ini juga dipersulit dengan kondisi jumlah divisi yang terlalu sedikit jika dikaitkan dengan geografis Indonesia dan tidak adanya keterpaduan antar matra dalam melakukan operasi militer, bahkan gelar pasukan lebih ditujukan untuk penguatan matra darat jika dilihat dari jumlah personel yang dimiliki. Situasi ini mengindikasikan bahwa ancaman eksternal maupun perubahan lingkungan strategisnya belum menjadi salah satu faktor utama dalam pola penyebaran pasukan Indonesia. Sementara geografis Indonesia yang kepulauan dan sangat terbuka bagi masuknya ancaman terorisme.

Jika kita melihat kondisi kawasan Asia Tenggara maka hampir semua negara di ASEAN merasakan dampak pengeboman WTC pada 11 september 2001 yang lalu, tidak terkecuali Indonesia yang merupakan negara islam terbesar di dunia, dampak yang dirasakan dari kejadian tersebut adalah munculnya kekhawatiran akan terjadinya serangan teroris. Ada dua faktor mengapa kawasan Asia Tenggara menjadi tempat yang dipilih oleh para teroris internasional untuk berkembang dewasa ini, Pertama, mayoritas penduduk di kawasan ini beragama Islam, yakni agama yang sama dengan yang dipeluk oleh Osama bin Laden. Kedua, kawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Terlebih lagi wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) seluas 4 juta km². Keadaan geografis ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jalur perlintasan mengingat fungsi laut sebagai jalur transportasi. Aktivitas perairan di laut yang cukup penting bagi masyarakat internasional membuat keamanan laut di Indonesia menjadi faktor vital dalam keamanan mengingat wilayah perairan Indonesia digunakan sebagai jalur lalu lintas laut internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI). Hal tersebut masih ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki 4 dari 9 *choke points* di dunia yang sangat vital sebagai jalur transportasi laut untuk perdagangan dan jalur minyak, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Ombai Wetar. Karena itu, secara geopolitik, kondisi nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis.

Jika melihat keadaan geografis Indonesia dan ancaman terorisme maka terdapat kesenjangan gelar pasukan yang justru tidak siap dalam menjaga kedaulatan negara. Secara normatif, gelar pasukan seharusnya ditempatkan pada wilayah-wilayah yang penting atau hot spot area dan didukung dengan kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang tersebar dan terpisahkan oleh lautan. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia yang sangat terbuka dan rentan terhadap

masuknya ancaman. Realitanya, strategi gelar pasukan belum mampu untuk secara signifikan mempengaruhi orientasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman eksternal, gelar pasukan Indonesia masih melihat ancaman dari dalam negeri sebagai ancaman yang paling berbahaya sementara perubahan lingkungan strategisnya belum menjadi faktor penting perumusan strategi gelar pasukan Indonesia.

Ancaman terorisme yang selama ini bermain di luar batas nasional seperti Jaringan kelompok terorisme Jemaah Islamiyah yang terkait dengan Majelis Mujahidin Indonesia, Kumpulan Militan Malaysia, *Moro Islamic Liberation Front* di Filipina, serta jaringan terorisme internasional Al-Qaeda. Jaringan-jaringan ini telah memberikan ancaman yang bersifat global dan regional, di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok terorisme ini sangat mengganggu stabilitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini seharusnya, dapat menjadi tolak ukur bagi Indonesia untuk mampu menghadapi jenis karakter ancaman ini. Namun, faktanya gelar pasukan Indonesia belum secara signifikan digelar pada wilayah-wilayah yang rawan yang menjadi *entry point* bagi masuknya terorisme ke Indonesia, jalur masuknya terorisme yang sangat terbuka yaitu, Selat Malaka, wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah utara dari pulau Sulawesi yang rentan terhadap masuknya ancaman asimetris.

Aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini Indonesia, marak terjadi. Tempat yang menjadi sasaran aksi terorisme pun beraneka ragam, tidak hanya fasilitas negara yang menjadi sasaran peledakan tetapi juga pusat perbelanjaan dan tempat-tempat ibadah keagamaan. Keanekaragaman tempat yang menjadi sasaran peledakan bom di Indonesia menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Aksi terorisme semakin menjadi ancaman yang dianggap paling berbahaya karena aksi yang dilakukan tidak memiliki target tertentu dan seringkali dilakukan ditempat-tempat yang ramai sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Alasan lain adalah terorisme juga merupakan kejahatan yang tidak kentara pelakunya maupun strategi serta target aksinya, terorisme juga memiliki efek yang sangat besar

terhadap stabilitas keamanan baik di suatu kawasan maupun dalam lingkungan global.

Penempatan pasukan di wilayah-wilayah yang menjadi tempat berkembangnya ancaman sangatlah diperlukan karena wilayah-wilayah inilah yang akan menjadi pintu masuk bagi ancaman terorisme untuk masuk hingga ke wilayah darat Indonesia dan berkembang dengan cara merekrut kader-kader muda di daerah setempat dan semakin leluasa untuk menyebarkan pengaruh terorisme di wilayah-wilayah lainnya. Secara normatif, gelar pasukan seharusnya ditempatkan pada wilayah-wilayah yang penting atau hot spot area dan didukung dengan kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan strategis dan kondisi geografisnya sehingga menciptakan efek penangkalan terhadap ancaman. Realitanya, strategi gelar pasukan belum mampu untuk secara signifikan mempengaruhi orientasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan persaingan eksternal.

4.1.2. Kebijakan Penanganan Terorisme yang Tidak Sejalan Dengan Kebijakan TNI dalam Menempatkan Pasukan

Penanganan terhadap ancaman baik terorisme maupun ancaman transnasional lainnya merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pola pendekatan yang digunakan adalah pola preventif dengan mengintensifkan peran dari intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus sebagai kekuatan responsif. Namun pada kenyataannya, penguatan kekuatan pertahanan lebih difokuskan kepada matra darat yang menimbulkan gelar pasukan yang lebih dipusatkan pada wilayah internal Indonesia dengan mengabaikan ancaman eksternal.

Kehadiran ancaman eksternal justru tidak diimbangi dengan strategi gelar pasukan matra darat yang seharusnya lebih difokuskan pada wilayah terluar geografis Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa strategi gelar pasukan masih diorientasikan kepada penciptaan stabilitas dalam negeri dan lebih melihat

ancaman internal sebagai ancaman yang paling mungkin terjadi dan mengancam kedaulatan Indonesia. Padahal, seharusnya persepsi terhadap ancaman harus diarahkan tidak hanya kepada wilayah internal Indonesia saja akan tetapi juga perlu untuk melihat wilayah eksternal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi strategi gelar pasukan Indonesia.

Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kesatuan wilayah kedaulatannya dari ancaman yang muncul diperlukan suatu sistem pertahanan negara yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ancaman. Sistem Pertahanan Negara menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Perubahan karakteristik ancaman menjadi salah satu faktor yang seharusnya mempengaruhi strategi gelar pasukan Indonesia, mengingat bahwa semakin kompleksnya ancaman yang muncul dewasa ini. Akan tetapi pada kenyataannya, strategi gelar pasukan Indonesia belum merefleksikan hal tersebut ke dalam strategi pertahanannya. Hal ini dapat dilihat pada pola penyebaran pasukan baik matra darat, matra laut dan udara yang tidak mengalami perubahan. Konteks gelar pasukan justru tidak menyentuh karakteristik ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Hal ini belum mampu untuk melihat potensi ancaman eksternal yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Penyelenggaraan pertahanan tidak terlepas dari bagaimana strategi pertahanan yang diterapkan serta bagaimana doktrin pertahanan yang berfungsi sebagai cara pandang komponen pertahanan dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai respon penyelenggara pertahanan terhadap ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Rizal Sukma, menjelaskan bahwa untuk 5 – 10 tahun mendatang tantangan keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia akan berkisar kepada upaya penanggulangan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Menjaga keutuhan wilayah RI
2. Memulihkan stabilitas internal, khususnya penegakan *law and order*
3. Mempercepat pemulihan ekonomi
4. Menyelesaikan dan mencegah konflik-konflik komunal
5. Membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi
6. Menciptakan stabilitas kawasan dan regional
7. Mengelola hubungan setara dan berkeuntungan timbal balik dengan anggota masyarakat internasional lainnya.

Dalam penyelenggaraan pertahanan indonesia, gelar pasukan yang ada tidak sesuai dengan tujuan politik negara yang telah diformulasikan di dalam penyelenggaraan pertahanan dimana penyelenggaraan pertahanan seharusnya ditujukan kepada pengaman ke seluruh wilayah indonesia termasuk pulau-pulau terluar indonesia. Namun pada kenyataannya gelar pasukan indonesia masih dilakukan pada pulau-pulau yang notabene berada di bagian dalam dari kedaulatan indonesia. Hal ini menunjukkan persepsi indonesia terhadap ancaman yang masih dominan melihat ancaman internal sebagai ancaman yang paling berpotensi merusak stabilitas keamanan negara.

Pada umumnya kebijakan pertahanan akan selalu memperhatikan tiga hal yaitu perlindungan wilayah/teritorial, kedaulatan dan keselamatan bangsa dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasional. Menurut Edy Prasetyono dalam upaya untuk memenuhi kepentingan pertahanan nasional perlu untuk memperhatikan, **pertama**, faktor geostrategis negara baik ke dalam dan keluar. Ke dalam, yaitu untuk menciptakan sistem pertahanan nasional yang kredibel didasarkan atas konsep *unified approach* atau *a single all-encompassing strategy* yang mengcover 17 ribu lebih pulau dengan luas 7.7 juta km² (termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif) dengan panjang pantai sekitar 80 ribu kilometer. **Kedua**, sistem dan strategi pertahanan nasional harus mempertimbangkan perubahan-perubahan dunia internasional, terutama perubahan sifat perang, sifat dan bentuk

ancaman dalam dunia yang digerakkan oleh perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi.

Pada faktanya, gelar pasukan yang ada, tidak mampu memberikan perlindungan terhadap wilayah negara Indonesia yang memiliki pulau-pulau terluar yang begitu banyak namun belum mendapatkan pengawasan dan pengamanan yang serius. Disisi lain, kedaulatan yang kini mulai mengkhawatirkan sebagai akibat dari adanya ancaman terorisme justru tidak menjadi perhatian utama meski ancaman terorisme telah mampu merusak stabilitas berbangsa dan bernegara yang dapat mengarah pada melemahnya kesatuan wilayah Indonesia. Bentuk ancaman terorisme yang mampu memberikan efek kerusakan yang parah seperti pemboman dan penghancuran kini telah mampu mengancam keselamatan bangsa jika dihadapkan pada konsekuensi ancaman terorisme. Hal ini menuntut adanya strategi gelar pasukan yang dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat Indonesia dan juga kawasan Asia Tenggara.

Strategi gelar pasukan Indonesia tampaknya akan sulit dalam memberikan perlindungan terhadap stabilitas politik dan keselamatan negaranya jika strategi gelar pasukan tidak mampu menghadapi karakteristik ancaman ini. Kelemahan ini terlihat pada gelar pasukan matra darat yang hanya ditempatkan pada wilayah internal dan lebih parah lagi penyebaran pasukan yang sama sekali tidak mengalami perkembangan sementara perkembangan ancaman semakin mengkhawatirkan. Penyebab lain dari stagnannya gelar pasukan Indonesia yang tidak melihat ancaman dari luar adalah betumpunya kekuatan pertahanan Indonesia pada kekuatan matra darat, yang mana berbanding terbalik dengan kondisi nyata geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Pada matra udara, gelar pasukan juga belum mencakup ke seluruh wilayah udara Indonesia. Hal ini terlihat dari penyebaran yang lebih difokuskan pada wilayah internal Indonesia dengan penempatan pasukan udara pada wilayah Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Matra udara seharusnya mampu melakukan pengendalian terhadap wilayah udara yang meliputi deteksi, identifikasi dan penindakan. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mampu untuk dilakukan mengingat

gelar pasukan yang hanya bermain pada tataran internal indonesia dan mengabaikan bentuk-bentuk ancaman lintas negara yang pada kenyataannya bermain di wilayah terluar dari kedaulatan indonesia.

Lebih jauh lagi, matra laut hanya ditempatkan di beberapa wilayah yang justru tidak menyentuh ancaman terorisme yang bermain di wilayah pulau terluar indonesia. Keberadaan terorisme di Filipina yang mampu memberikan ancaman terhadap kedaulatan indonesia semestinya di lihat sebagai salah satu ancaman yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi penyebaran pasukan matra laut lebih difokuskan pada wilayah dalam indonesia, seperti wilayah jakarata, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya yang berada di wilayah dalam indonesia.

4.2. Kesimpulan

Strategi gelar pasukan Indonesia yang dilaksanakan belumlah mampu untuk mencakup ke seluruh wilayah indonesia dan belum melihat ancaman eksternal sebagai potensi yang dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Strategi gelar pasukan Indonesia yang dilakukan lebih dipusatkan pada wilayah internal indonesia. Hal ini terlihat dari penyebaran pasukan matra darat, laut dan udara yang belum komprehensif dan melihat ancaman yang berasal dari luar wilayah indonesia serta ketidakmampuan dalam melakukan penyebaran pasukan yang disesuaikan dengan kondisi geografis indonesia dan maraknya ancaman-ancaman yang terjadi di regional Asia Tenggara. Gelar pasukan indonesia belumlah mampu untuk menciptakan kemampuan pertahanan yang dapat memberikan rasa aman terhadap warga negaranya dan belum memberikan suatu rumusan strategi pertahanan yang komprehensif terhadap perkembangan ancaman yang terjadi dan kondisi geografis yang memiliki banyak pulau, ditambah dengan 4 *choke points* yang sangat terbuka terhadap masuknya ancaman dari luar.

Ancaman terorisme merupakan ancaman yang seharusnya menjadi ancaman yang paling diperhatikan mengingat konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan dari ancaman terorisme tersebut jika sampai terjadi di wilayah darat

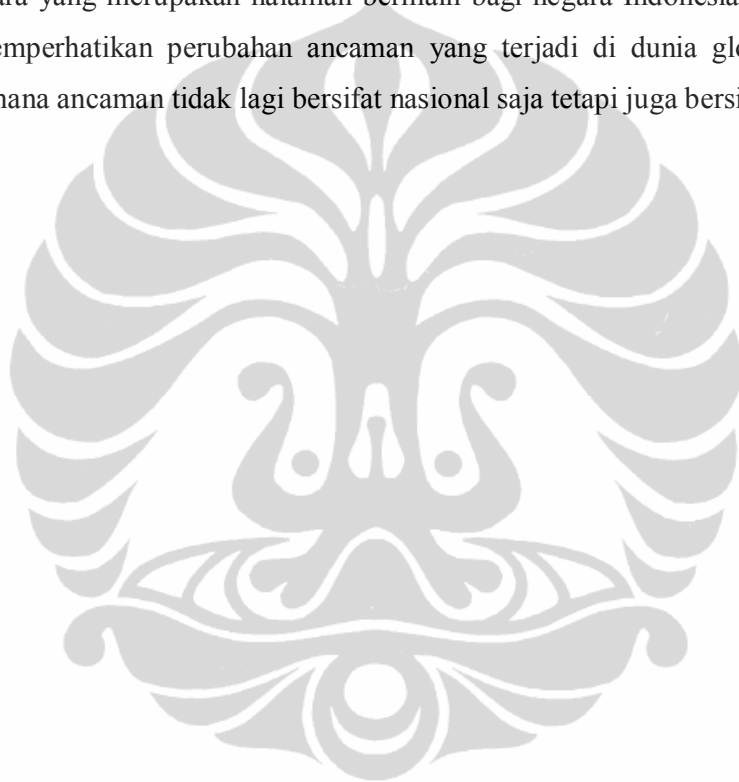
Indonesia. Strategi gelar pasukan seharusnya melihat jaringan terorisme sebagai ancaman yang paling nyata terhadap wilayah Indonesia dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara dikarenakan aksi terorisme yang dilakukan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan lokasi aksi terorisme yang tidak diketahui dan dapat menimpa siapa saja. Akan tetapi eskalasi ancaman dan perkembangan konflik yang terjadi di kawasan tidak dilihat sebagai potensi ancaman yang seharusnya direspon dengan gelar pasukan yang lebih ditempatkan pada wilayah terluar Indonesia.

Isu terorisme membawa beberapa implikasi. Pertama, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengancam jiwa manusia dan mengancam seluruh negara. Kedua, sebagai ancaman nyata, isu terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi; sehingga menuntut kesiapsiagaan yang prima. Ketiga, penanganan terorisme memaksa adanya peningkatan kerja sama pertahanan menjadi lebih intensif dan progresif. Keempat, penanganan terorisme dengan menggunakan kekuatan militer menjadi salah satu pilihan strategi pertahanan, sehingga harus ada aturan yang jelas agar tidak berbenturan dengan norma-norma demokrasi dan hak azasi manusia.

Keempat implikasi diatas dapat menjadi salah satu faktor bagi pertahanan Indonesia dalam melihat ancaman yang terjadi di wilayah terluar Indonesia, khususnya terorisme. Jika terorisme dapat masuk hingga ke wilayah dalam negara Indonesia maka hal ini akan sangat berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena jelas aksi terorisme yang dilakukan dapat merusak tatanan keamanan di dalam negeri serta melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme tersebut yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ditambah lagi dengan akan munculnya keraguan masyarakat Indonesia terhadap kemampuan negara dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya.

Selama ini gelar pasukan Indonesia lebih ditujukan kepada penciptaan stabilitas keamanan dengan melihat potensi ancaman yang lebih besar datang dari wilayah internal negara, sementara ancaman-ancaman lintas negara terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu diperlukannya rumusan kebijakan

yang dapat diterapkan secara efektif untuk dapat menciptakan daya tangkal yang sangat kuat dalam menghadapi perbedaan karakteristik ancaman yang muncul. Perumusan kebijakan gelar pasukan Indonesia harus melihat beberapa faktor yang akan mempengaruhi kekuatan pertahanan Indonesia, pertama, gelar pasukan haruslah disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan sangat terbuka terhadap masuknya pengaruh asing ke dalam wilayah Indonesia. Kedua, haruslah memperhatikan perubahan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara yang merupakan halaman bermain bagi negara Indonesia. Ketiga, haruslah memperhatikan perubahan ancaman yang terjadi di dunia global dan kawasan dimana ancaman tidak lagi bersifat nasional saja tetapi juga bersifat



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Analisa penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat sebagai pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesa yang ditawarkan di dalam penelitian ini. Analisa penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif ini menekankan pada bentuk interaksi antar variabel. Interaksi antar variabel ini menggambarkan strategi gelar pasukan Indonesia yang tidak menghiraukan keberadaan terorisme dan bentuk kebijakan penanganan terorisme yang tidak terimpelmentasi di lapangan atau bentuk gelar pasukan yang tidak sesuai dengan bentuk kebijakan dalam penanganan terorisme. Proses analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan melalui proses penggambaran perkembangan ancaman terorisme sebagai ancaman asimetris/ancaman transnasional yang sangat berbahaya dan mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara dan strategi gelar pasukan Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan masih melakukan pola yang sama dengan pola gelar pasukan beberapa tahun yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa strategi gelar pasukan Indonesia masih berorientasi kepada pengamanan dalam negeri saja atau *inward looking* dalam melihat ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia. Sementara ancaman-ancaman asimetris yang berasal dari luar wilayah Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang besar. Hal ini menjadi polemik tersendiri dalam upaya bersama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam upaya memberantas terorisme di kawasan yang sifatnya transnasional.

Perubahan konsep ancaman dari yang bersifat militer ke ancaman yang bersifat nirmiliter akan mempengaruhi stabilitas keamanan baik di kawasan maupun di dalam wilayah Indonesia. Perubahan tersebut mulai muncul dan menjadi perhatian dunia pasca terjadinya tragedi 11 September 2001 atau tragedi WTC dan ancaman-ancaman terorisme di ranah regional Asia Tenggara yang

semakin marak terjadi. Walaupun demikian, Asia Tenggara menjadi wilayah yang paling disorot oleh dunia internasional terkait dengan isu terorisme ini. Wilayah ini telah menarik perhatian dunia ketika pergerakan terorisme berkembang seperti “Front Jemaah Islamiyah” (Indonesia, Kelompok Abu Sayyaf dan Front Pembebasan Islam Moro (Filipina), Front Pembebasan Pattani (Thailand) dan kelompok Militan Malaysia (Malaysia) yang mana berpotensi mengancam keamanan wilayah Asia Tenggara. Tempat yang menjadi sasaran aksi terorisme pun beraneka ragam, tidak hanya fasilitas negara yang menjadi sasaran peledakan tetapi juga pusat perbelanjaan dan tempat-tempat ibadah keagamaan. Keanekaragaman tempat yang menjadi sasaran peledakan bom di Indonesia menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

Maraknya ancaman-ancaman terorisme yang sifatnya transnasional dan ancaman-ancaman lainnya terhadap kedaulatan Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan kekuatan pertahanan serta strategi gelar pasukan, strategi gelar pasukan Indonesia untuk ketiga matra tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi gelar pasukan lebih ditujukan untuk pengamanan keamanan di dalam negeri dengan melihat ancaman yang datang dari internal negara. Seharusnya strategi gelar pasukan Indonesia lebih ditujukan untuk tidak hanya berorientasi ke dalam tetapi juga berorientasi keluar dengan melihat ancaman transnasional yang datang dari luar.

Meningkatnya potensi ancaman dan spektrum ancaman, memotivasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan pengembangan kekuatan persenjataan dan meningkatkan jumlah pasukannya untuk memperkuat kekuatan pertahanannya dalam melakukan operasi militer baik yang bersifat perang maupun operasi militer selain perang.

Kesiapan untuk menghadapi ancaman asimetris ini, salah satunya terletak pada bentuk strategi gelar pasukan yang disiapkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Proses penggelaran pasukan diawali dengan formulasi kebijakan yang mampu menghadapi jenis ancaman yang ada. Dalam perang melawan terorisme, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN sepakat untuk menandatangani perjanjian bersama melawan terorisme, *ASEAN Convention on*

Counter Terrorism (ACTT) yang ditandatangani pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 di Cebu Filipina 13 Januari 2007. Pemerintah Indonesia juga telah menjadikan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 sebagai dasar hukum dalam upaya tindak pidana terorisme. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Terorisme Tahun 1997 dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999.

Bentuk kebijakan yang ditujukan untuk menghadapi terorisme tersebut, justru tidak disikapi secara positif dalam implementasi strategi. Implementasi secara normatif seharusnya menekankan pada bagaimana gelar pasukan disesuaikan dengan ancaman yang ada. Meski begitu, tetap saja strategi gelar pasukan tidak merefleksikan kondisi tersebut. Gelar pasukan TNI, baik angkatan udara, laut, dan darat, belum mengindikasikan strategi gelar pasukan yang sesuai dengan ancaman yang ada.

Dari data gelar pasukan TNI pada tahun 2007, dapat dilihat bahwa strategi gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia tidak mengalami perubahan atau pun stagnan. Daerah-daerah yang menjadi tempat pegelaran pasukan masih sama. Hal ini menunjukkan bahwa warisan orde baru dimana persepsi ancaman masih ditujukan ke dalam negeri serta penggunaan kekuatan militer yang ditujukan untuk stabilitas dalam negeri masih sangat tinggi, sementara ancaman yang datang dari eksternal masih belum mendapat perhatian yang lebih.

Secara normatif, gelar pasukan seharusnya ditempatkan pada wilayah-wilayah yang penting atau hot spot area dan didukung dengan kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan strategis dan kondisi geografisnya sehingga menciptakan efek penangkalan terhadap ancaman. Realitanya, strategi gelar pasukan belum mampu untuk secara signifikan mempengaruhi orientasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan ancaman eksternal. Dengan kata lain, ancaman-ancaman yang datang dari dalam negeri Indonesia masih menjadi perhatian utama pengambil kebijakan pertahanan dalam mengarahkan pandangannya, sementara ancaman-ancaman yang terjadi di

luar kedaulatan wilayah Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang seharusnya. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pengambil kebijakan dalam upaya untuk menciptakan strategi pertahanan yang komprehensif dengan kondisi geografis dan perubahan lingkungan strategisnya.

5.2. Implikasi Teoritis

Penggunaan konsep atau teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka berpikir penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Operasionalisasi konsep yang telah dijabarkan menuntun penulis dalam menjelaskan dan menganalisa meningkatnya spektrum ancaman di kawasan Asia Tenggara, ancaman terorisme di regional yang sangat ditakutkan serta strategi gelar pasukan Indonesia dalam berperspektif terhadap eskalasi ancaman dan konflik yang mungkin terjadi terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Teori *Force Employment* yang digunakan dalam menganalisa perubahan ancaman di regional digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat pola gelar pasukan Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi geografi Indonesia. Dalam operasional gelar pasukan, teori ini telah membantu menjelaskan pada bagaimana strategi gelar pasukan yang dilakukan TNI dalam yang bersifat internal. Kondisi ini menggambarkan bahwa strategi gelar pasukan Indonesia tidak ditujukan untuk menghadapi ancaman eksternal tetapi lebih ditujukan untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri saja, sementara maraknya ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah eksternal masih terabaikan.

Sedangkan konsep *asymmetric conflict* untuk melihat posisi Indonesia jika terjadi konflik asimetris, dalam hal ini terorisme sebagai ancaman yang paling nyata, serta bagaimana seharusnya Indonesia bersikap dalam menghadapi ancaman tersebut. Konsep ini menjelaskan pada bagaimana sebuah negara dengan karakteristik *strong actor* seharusnya menekankan pada strategi *Barbarism* dalam menghadapi ancaman-ancaman asimetris yang berkembang. Pada akhirnya pemikiran ini telah menuntun pada pola analisa yang membantu menjelaskan strategi *strong actor*, seperti ini Indonesia yang justru tidak menekankan pada

strategi *Barbarism*, namun justru menggunakan strategi *Direct Attack*. Dengan demikian konsep dan teori yang digunakan telah dapat memberikan gambaran dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang digunakan dan menjawab hipotesa penulis dalam penelitian ini.

5.3. Implikasi Kebijakan

Dengan melihat data-data yang telah dijelaskan dan melihat eskalasi ancaman dan konflik yang berpotensi terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia, serta strategi gelar pasukan yang mengalami stagnasi, terbukti bahwa pandangan Indonesia terhadap ancaman lebih banyak ditujukan ke dalam atau internal, dengan melihat kondisi dalam negeri sebagai potensi ancaman terbesar bagi Indonesia. Hal ini belumlah merefleksikan perubahan ancaman dan maraknya ancaman-ancaman transnasional seperti terorisme, konflik perbatasan dengan negara tetangga, perdagangan manusia, peredaran senjata ilegal serta perdagangan narkoba sebagai ancaman yang akan mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan demikian, diperlukannya evaluasi kembali terhadap orientasi Indonesia dalam melakukan gelar pasukan di mana seharusnya perspektif terhadap ancaman tidak hanya ditujukan kepada ancaman yang bersifat eksternal saja tetapi juga harus melihat ancaman yang bersifat eksternal dengan mempelajari perubahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dilihat dari tempat bermainnya ancaman-ancaman tersebut, dimana wilayah terluar Indonesia yang menjadi sasaran awal penciptaan konflik di Indonesia sebelum masuk ke wilayah dalam, oleh karena itu diperlukan suatu strategi gelar pasukan yang dapat mencakup ke seluruh wilayah terluar dan pulau-pulau terpencil dari Indonesia. Gelar pasukan harusnya dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungan strategis Indonesia dalam hal ini Asia Tenggara, dan melihat geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia.

Evaluasi strategi gelar pasukan terletak pada pemahaman formulasi kebijakan yang mampu, menjadi payung pertahanan dan keamanan dan

implementasi kebijakan tersebut dalam strategi gelar pasukan. Implementasi formulasi kebijakan yang disesuaikan dengan ancaman eksternal sebaiknya dijalankan melalui bentuk pengawasan dan konsistensi pelaksanaan, baik perumusan kebijakan yang bersifat eksternal dan implementasi kebijakan yang mampu mengarahkan gelar pasukan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang mengancam kedaulatan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasnan Habib, “*Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional,*” dalam Ichlasul Amal dan Atmadidy Armawi, ed., *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional* (Jakarta, 1995).
- , “*Terorisme Internasional, “Dalam Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional,* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997.
- Arreguin-Toft, Ivan., “*How The Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict,* International Security, Vol.26 No.1 (summer 2001).
- , *Obstacles to Enduring Peace in Asymmetric Conflicts : a U.S. perspective,* OSLO forum 2007. *Journal of Asia Pacific Studies,* 2009.
- Balakrishnan, K.S (2002). *Keganasan antarabangsa dan kerjasama ASEAN (The international terrorism and ASEAN cooperation).* *Jurnal Pemikir* (29). July –September.
- Biddle, Stephen., *Rebuilding the Foundation of Ofense-DefenseTheory,* The Journal of Politics, Vol 63, No. 3, Agustus 2001.
- , “*Military Power : Explaining Victory and Defeat in Modern Battle,* Princeton University Press.
- Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, 2003.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008.
- Counterterrorism Division Federal Bureau of Investigation (FBI).*
- Davis, Paul K. Et al, *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a New Framework,* Issue Paper, Rand: National Defense Research Institute August 1996.
- Doktrin Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007.
- Fortuna Anwar, Dewi. *Indonesia at Large; collected writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratization,* Jakarta; The Habibie Centre, 2006.
- Hoffman, Bruce, *Responding to terrorism across the technologies spectrum.* Pennsylvania : Strategic Studies Institute, 1994.

Howard, Michael (2001). *Modernization The Right Way To Defeat Terrorist*. New Straits Times, 16 September.

[Http://Cetak.Kompas.Com/Read/2009/02/13/00233162/Keamanan.Nontradisional](http://Cetak.Kompas.Com/Read/2009/02/13/00233162/Keamanan.Nontradisional)

. Anak Agung Banyu Perwita, *Keamanan Non tradisional*, 2009.

Ihza, Yusron, *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, Latofi Enterprise, 2009.

Irjen. Pol. Dr. Farouk Muhammad, *Keamanan Domestik*; Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Journal of Asia Pacific Studies, Vol 1, No 1, 27-48, 2009.

Kolonel Inf. Loudewijk F. Paulus, *T E R O R I S M E*, Kopassus.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010 – 2014.

Luhulima, C.P.F., *Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara*, dalam *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003 No. 1, 2003.

Jakarta: CSIS, 2003. h. 32, Frank, Libor. *The Czech Republic Security Environment*, diakses pada 20 Agustus 2008 melalui http://www.army.cz/mo/om/obrana_a_strategic/1-2003eng/frank.pdf.

Mahmud, Zin (2002). *Osama Masih Jadi Ancaman (Osama still a threat)*. Massa. No.370. 23-29 November.

Mayjen TNI Sudrajat, *Perubahan Wajah Ancaman Dan Keamanan Domestik Indonesia* Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Pembangunan Hukum Nasional VIII”, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

McKenzie, Jr., Kenneth F. *The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning*, Chapter Three, 2001.

Morrison, Charles E., *Asia Pacific Security Outlook 2003*, Japan: Japan Center for International Exchange, 2003; Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook 2004*, Japan: Japan Center for International Exchange, 2004; Dr. Bambang Cipto, MA, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Newman W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc (fifth edition), 2003.

- , “*Social Research Methods, 4th edition*”, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, *Mari Kita Bersatu dalam Melawan Aksi-Aksi Terorisme*, dalam Tabloid Palagan; Media Pemersatu Bangsa, edisi 41, September 2009.
- Penjelasan Undang Undang No.34 tahun 2004, pasal 11 (2).
- Postur Pertahanan Negara 2009 – 2029.
- Prasetyono, Edy., *Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan*.
- Rahakundini Bakrie, Connie. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Rose, Gregory and Diana Nestorovska, *Asean Features : Towards an asean counter-terrorism treaty*, Singapore Year Book of International Law and Contributors , 2005.
- Salleh, Wan Ahmad Farid bin Wan. “Terrorism in Southeast Asia : How Real is the Threat”, *The Indonesian Quarterly*, vol.XXX, No.1, First Quarter, 2002.
- Schmid, Alex. *Political Terrorism; A Research Guide*. New Brunswick, N.J.: Trans Action Books, 1984, seperti dikutip dalam Walter Lacqueur, “reflection on Terrorism,” *Foreign Affairs*, Fall 1980.
- Sukawarsini Djelantik. “*Teroris Internasional: Aktor Bukan Negara Dalam Hubungan Internasional*”, dalam *Perubahan Global dan Perkembangan studi Hubungan Internasional*, Editor Andre H. Pareira, *Parahyangan Centre For International Studies (PACIS)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sukma, Rizal. *Konsep Keamanan Nasional*, CSIS, Jakarta FGD Pro-Patria, 28 2002.
- Sukma, Rizal. *Postur Pertahanan Indonesia; Pengantar Diskusi Untuk FGD-ProPatria Jakarta*, CSIS, 5 Februari 2003.
- Strategi Pertahanan Indonesia 2008.
- Strategic Survey-Asia, 2001.
- Steven, Graeme C.S. & Rohan Gunaratna, *Counterterrorism: A Reference Handbook* (St. Barbara, California: Contemporary World Issues, 2004.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Terrorism in the Unites States (1999) *Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit*.

Tujuan dan Motivasi Teroris Translated, 22 September 2010 04:00 Translated by Mayor polsan Situmorang Sumber Terrorism-Research.com-Privacy Policy.

Van Evera, Stephen,. *Offense, Defense, and the Causes of War*, International Security, Vol. 22, No. 4 (Spring, 1998).

Waluyo, *Kontra Terorisme*, 2009.

White Paper, *The Jemaah Islamiyah and The Threat of Terrorism*, Ministry of Home Affairs, Republic of Singapore, 2003.

Widjajanto, Andi., “Gelar Pertahanan Indonesia”, diunduh melalui [http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia\[powerpoint\]-AndiWidjajanto.pdf](http://www.propatria.or.id/loaddown/Paperdiskusi/GelarPertahananIndonesia[powerpoint]-AndiWidjajanto.pdf), diakses tanggal 22 Juni 2011.

